



PEMERINTAH KOTA MAGELANG



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

 [bappeda.magelangkota.go.id](http://bappeda.magelangkota.go.id)  
 [@bappedakotamgl](https://twitter.com/bappedakotamgl)  
 [bappeda@magelangkota.go.id](mailto:bappeda@magelangkota.go.id)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**K O T A M A G E L A N G**

**2016**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji hanya bagi ALLAH SWT, atas segala karuniaNya sehingga pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat menyelenggarakan amanat pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan baik dan lancar dalam rangka untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Visi Misi SKPD. Implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan amanat tersebut termanifestasikan dalam Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015.

Penyusunan LKj IP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, melalui LKj IP tersajikan potret penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksanakan dan mendukung perwujudan masyarakat yang sejahtera.

LKj IP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 disusun sesuai amanat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran indikator - indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja sebagai acuan penyusunan LKj IP ini telah dilakukan dengan mendasarkan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2015, yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian penyusunan LKj IP Tahun 2015 sudah sepenuhnya menggunakan tolok ukur indikator - indikator kinerja sebagaimana yang tertuang di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang maupun indikator Kinerja Utama Daerah sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 - 2015 maupun Indikator Kinerja Daerah di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015.

LKj IP Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 ini semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Akhir kata kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKj IP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, Pebruari 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL

Pembina Utama Muda

NIP. 19601212 198903 1 018



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 .....	8
B. Gambaran Umum Organisasi .....	10
C. Isu Strategis Organisasi .....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2011-2015 .....	28
B. Perjanjian Kinerja .....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2015 .....	60
B. Realisasi Anggaran .....	113
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	119
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	120



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam mendukung perwujudan Visi Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL” . Adapun makna Visi tersebut adalah :

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Berkualitas artinya bahwa perencanaan harus mengedepankan kualitas baik proses perencanaan, produk perencanaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi.
- c. Partisipatif artinya bahwa dalam proses perencanaan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan aspirasi berupa kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan akan muncul rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun/ direncanakan.
- d. Berkeadilan artinya bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan memperhatikan program-program berkeadilan yang meliputi: (1) Pro-rakyat; (2) Keadilan untuk semua; dan (3) Pencapaian MDG's, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010
- e. Profesional artinya bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance.

Berdasarkan Visi di atas, dirumuskan ke dalam 4 Misi yang dipergunakan dalam rangka untuk pencapaian Visi Bappeda Kota Magelang Tahun 2011-2015, sebagai berikut

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur perencanaan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional;
- b. Memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan kualitas produk dan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang berkeadilan;

d. Meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ringkasan laporan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 diukur berdasarkan atas hasil pengukuran atas sasaran - sasaran strategis sebagaimana yang terdapat di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2011 – 2015, dimana pengukuran keberhasilan atau kegagalan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ini didasarkan pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dari evaluasi terhadap 15 sasaran strategis, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai capaian lebih dari 100%, 12 (dua belas) sasaran strategis dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%, dan 1 (satu) sasaran strategis dengan capaian di bawah 100% yaitu dengan capaian sebesar 98%. Adapun rata – rata capaian dari 19 sasaran strategi yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada tahun 2015 yaitu sebesar 101,3 %
2. Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan direpresentasikan melalui 6 (enam) urusan wajib, 15 (lima belas) program, dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan sehingga diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan mempercepat pencapaian sasaran – sasaran tersebut
3. Dari evaluasi terhadap 72 (tujuh puluh dua) kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015, nilai capaian tertinggi dari pencapaian output kegiatan adalah 100.00% dan dicapai oleh 72 kegiatan. Adapun rata – rata capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 84.95%.
4. Secara keseluruhan Bappeda Kota Magelang pada Tahun 2015 telah mengalokasikan Total Belanja sebesar Rp.8.094.749.000,00. Total Anggaran pada Tahun 2015 tersebut terdiri dari Belanja Langsung yang dipergunakan untuk membiayai 72 (tujuh puluh dua) kegiatan belanja langsung sebesar Rp 5.833.892.000,00 dan Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.260.857.000,00. Realisasi Serapan anggaran pada tahun 2015 yaitu Rp. 7.011.568.571,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.955.839.270,00 dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.055.729.301,00. Rata-rata Realisasi Serapan Anggaran Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 sebesar 84,95 %.

Secara keseluruhan Rata – rata nilai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015 dapat dikategorikan berhasil dengan nilai sebesar 101,3%. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga beberapa kegiatan yang kinerjanya masih kurang terkait dengan kebijakan dan teknis pelaksanaan kegiatan, untuk itu perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun anggaran kedepan dapat terlaksana lebih baik.





## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka penyempurnaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka pada tanggal 21 April 2014 telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Perpres tersebut yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sehingga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah sudah tidak sesuai dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu.

Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas sejak tahun 2013.

## 2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan iktisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja SKPD tahun 2015 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 4. Sistematika

LKj IP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

- A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Isu Strategis Organisasi

### BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2011-2015
- B. Perjanjian Kinerja

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Tahun 2015
2. Realisasi Anggaran

#### BAB IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja
- C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

#### B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah

Untuk penyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan bidang fisik dan tata ruang, perencanaan bidang ekonomi, perencanaan bidang sosial budaya,;
- d. Pengkoordinasian kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;

- f. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan rencana program/ kegiatan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi peneglolaan keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- (3) Kepala Sub Bagian Program

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, perternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh

- (1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha

d. Bidang Sosial Budaya.

Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan

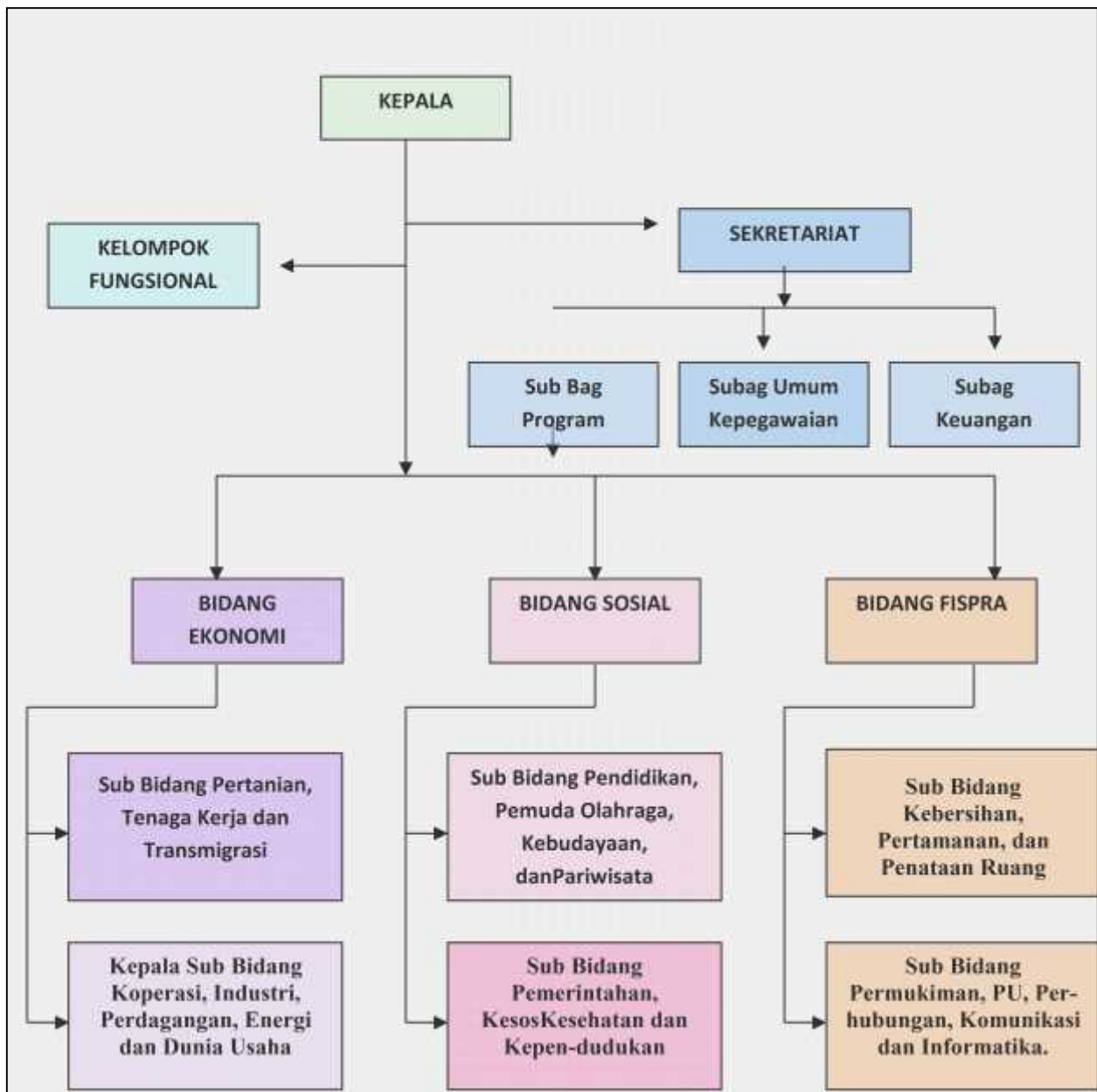
e. Bidang Fisik Prasarana.

Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bappeda Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana yang meliputi kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Fisik Prasarana dibantu :

- (1) Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Penataan Ruang
- (2) Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penge ndalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.
- c. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan.
- d. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya.
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana.
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD.
- h. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya serta bidang fisik dan prasarana.
- i. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
- Tugas Pokok dan Fungsi : Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian badan.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

Rincian Tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis badan.
- b. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan badan.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran badan.
- d. Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- e. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan.
- g. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang inventaris badan.
- h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan badan.
- i. Membantu atasan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- k. Membantu atasan dalam mengkoordinir proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.



- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan-laporan pelaksanaan kegiatan badan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan.
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja badan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan.
- c. Membantu atasan dalam mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan badan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan.
- e. Membantu atasan dalam menyusun laporan kinerja badan bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan.
- f. Membantu atasan dalam menyusun laporan akuntabilitas badan.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan.
- h. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Program.
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pada badan.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program.
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
- Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan badan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan badan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis tahun berjalan.
- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca badan.
- e. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan badan.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi anggaran badan.
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- h. Melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada badan.
- i. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Keuangan.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan.
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  
Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan kearsipan dan pengagendaan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar.
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga badan, termasuk perjalanan dinas.
- d. Melaksanakan administrasi dan pengelolaan inventaris/barang Badan (rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan pelaporan).
- e. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan protokoler.
- f. Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan, mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, pemberhentian serta pensiun pegawai di lingkungan badan.
- g. Mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan badan.
- h. Membuat daftar urut kepangkatan, cuti dan absen pegawai.
- i. Melaksanakan pengurusan kartu kepegawaian antara lain KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN.

- j. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- k. Menyiapkan bahan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, koperasi, transmigrasian, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang ekonomi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Ekonomi.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan bidang ekonomi.
- d. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. Membantu atasan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyusun rencana pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, transmigrasi, koperasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ekonomi.
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi.
- h. Melaksanakan program/kegiatan Sub.Bid Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi Dan Dunia Usaha
- Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam menyusun perencanaan

pembangunan di bidang koperasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha.
- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.

- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya
- Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial budaya
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya.

Rincian Tugas :



- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial Budaya.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan bidang sosial budaya.
- d. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membantu atasan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyusun rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Sosial Budaya.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Nama Jabatan : Kepala Subid Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata.

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.
- c. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- e. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.
- g. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- h. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Dan Kependudukan.

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan

kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.

- i. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- b. Pelaksanaan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- c. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Fisik dan Prasarana.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan bidang Fisik dan Prasarana.

- d. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Membantu atasan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyusun rencana pembangunan daerah bidang kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang fisik dan prasarana.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan Dan Penataan Ruang

Tugas Pokok dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan penataan ruang.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan penataan ruang.
- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.
- i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan penataan ruang serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Tugas Pokok Dan Fungsi : Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.



- d. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- f. Membantu atasan dalam mengkoordinir dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah yang berhubungan dengan permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.1 Sumber Daya Bappeda

### 1. Susunan Kepegawaian

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) harus dilandasi oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah Daerah adalah pengemban amanah kebijakan publik yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintahan pada masa mendatang harus mencerminkan pemerintahan yang cerdas dan mampu

menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan apabila aparaturnya cerdas.

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama - sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing - masing. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan satu bagian di dalam penyusunan Renstra Bappeda ini, dimana didalamnya terdapat perencanaan kebutuhan (baik kualitas maupun kuantitas), langkah dan strategi, pendidikan dan pelatihan karyawan serta kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan yang akan di tempuh dalam lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang terbagi atas 3 (Tiga) Bidang dan 1 (Satu) Sekretariat. Sedangkan jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2015 berjumlah 34orang dengan komposisi sebagai berikut:

- Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 55,88% dari total pegawai perempuan yaitu sebesar 44,12% sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	19	55,88%
2	Perempuan	15	44,12%
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester II Tahun 2015, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan lima tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dari jumlah pegawai laki-laki, namun selisihnya tidak signifikan hanya terpaut sekitar 11,76% hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender, selain itu komposisi karyawan Bappeda telah mencukupi kebutuhan sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat lapangan.

▪ Menurut Jabatan :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang antara Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 41,18 % hampir sebanding dengan jumlah pelaksana/staf yang sebesar 58,82 % dari total pegawai sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Magelang Menurut Jabatan (Struktural/Fungsional)

No	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	2.94 %
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	4	11.77 %
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	9	26.47 %
4	Pelaksana/staf	20	58.82 %
JUMLAH		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester II Tahun 2015, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf sudah cukup memenuhi kebutuhan, namun jumlahnya lebih sedikit apabila di dibandingkan dengan kondisi 5 tahun ke belakang di mana jumlah pegawai yang menduduki jabatan sebagai pelaksana/staf berkisar 60,6% dari jumlah pegawai yang ada. Jumlah pelaksana/staf yang menurun mengakibatkan jumlah pegawai belum bisa dikatakan mencapai jumlah ideal yang di butuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus di pikul oleh Bappeda, mengingat pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Kebanyakan pelaksana/staf yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, melakukan administrasi kearsipan bidang serta pekerjaan - pekerjaan lain sehingga dalam hal ini seorang pejabat Eselon IV harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Hal yang perlu di antisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural/fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 5 tahun ke depan terdapat 2 orang karyawan Bappeda yang memasuki masa pensiun. Selain karyawan yang memasuki masa pensiun, maka hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja

Untuk jabatan Fungsional pada saat ini di Bappedabelum ada dikarenakan pegawai yang seharusnya menduduki posisi sebagai Pejabat Fungsional tertentu menunggu penetapan jabatan fungsionalnya yang masih harus melalui beberapa proses. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk suatu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Keterbatasan jumlah pelaksana/staf ini harus segera di atasi mengingat dalam waktu lima tahun ada beberapa jumlah personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang pensiun.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Magelang Yang Pensiun dalam Lima Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan I	1	2018
2	Golongan IV	1	2020

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester II Tahun 2015, data diolah

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon IV di atas maka kita dapat meramalkan jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan secara teknis operasional dalam lima tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun, tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi pekerjaan.

- Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/ golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 70,59% dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	1	2.94 %
2	Golongan II	5	14.71 %
3	Golongan III	24	70.59 %
4	Golongan IV	4	11.76%
		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester II Tahun 2015, data diolah

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai dengan Golongan I dan Golongan II, berkedudukan sebagai pelaksana/staf sedangkan untuk karyawan Golongan III terdiri dari 1 orang berkedudukan sebagai Kepala Bidang, 9 orang berkedudukan sebagai Pejabat Eselon IV (Kasubid) dan 14 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Adapun pelaksana/staf dengan Pangkat Golongan III tersebut merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu (S1 ataupun S2). Jumlah karyawan dengan golongan II relatif cukup kecil hanya sebesar 14.71%. Mengingat pegawai golongan II bertugas di bidang administrasi perkantoran dan lapangan, sehingga ke depan perlu di rencanakan adanya penambahan kebutuhan jumlah pegawai dengan kriteria golongan II.

▪ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 85,29% dari total pegawai sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 2.5  
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Prosentase
1	Pasca Sarjana/ S2	6	17,65	5	14,71	11	32.35 %
2	Sarjana/ S1	8	23,53	8	23,53	16	47.06 %
3	Sarjana Muda/ D3	1	2,94	1	2,94	2	5.88 %
4	Sekolah Menengah Atas	2	5,88	1	2,94	3	8.82 %
5	Sekolah Menengah Pertama	1	2,94	-	0	1	2.94 %
6	Sekolah Dasar	1	2,94	-	0	1	2.94 %
		19		15		34	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester II Tahun 2015, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan sarjana/S1 yaitu sebanyak 47,06% yang terdiri dari 8 karyawan laki-laki dan 8 karyawan perempuan hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai pada Bappeda Kota

Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (the right man on the right place) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi SKPD.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 32,35 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, saat ini ada 7 (tujuh) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dengan mendapat fasilitas beasiswa yang sebagian besar berasal dari Bappenas.

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

Tabel 2.6  
Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)  
Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal

Bidang/Pendidikan	Jumlah
<u>Kepala Bappeda</u>	
S2 Urban Planing	1 org
<u>Sekretariat Bappeda</u>	
a. S2 Ekonomi Pembangunan	3 org
b. S1 Ekonomi Akuntansi	3 org
c. S1 Tehnik Informatika	1 org
d. S1 Tehnik Perenc. Wil Kota	2 org
e. S1 Ekonomi Manajemen	1 org
f. S1 Design Interior	1 org
g. S1 Hukum	1 org

Bidang/Pendidikan	Jumlah
<u>Kepala Bappeda</u>	
S2 Urban Planing	1 org
h. D3 Teknik Sipil	1 org
i. SLTA sederajat	1 org
j. Sekolah Dasar	1 org
<u>Bidang Ekonomi Bappeda</u>	
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org
b. S2 Manajemen SDM	1 org
c. S1 Akuntansi	1 org
d. D3 Tehnik Informatika	1 org
e. SLTA sederajat	1 org
<u>Bidang Fisik Prasarana Bappeda</u>	
a. S2 Teknik Perenc. Wil Kota	1 org
b. S1 Planologi	2 org
c. S1 Ilmu Administrasi Negara	1 org
d. S1 Arsitektur	1 org
e. SLTA sederajat	1 org
<u>Bidang Sosbud Bappeda</u>	
a. S2Administrasi Publik	1 org
b. S2 Teknik Perc. Wil Kota	1 org
c. S2 Teknik Pemb Wil Kota	1 org
d. S1 Tehnik Mesin	1 org
e. S1 Ekonomi Managemen	2 org
f. SLTP Sederajat	1 org

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Semester 1I Tahun 2015, data diolah

- i. **Perlengkapan Aset yang Dikelola Bappeda Kota Magelang**
- Perlengkapan dan aset yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan.
- Aset yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu aset yang berwujud dan asset yang tidak berwujud,
- a. Gedung bertingkat lantai dua 1 unit dengan luas bangunan 1088m<sup>2</sup>, yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 2 buah, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris dan ruang Sekretariat 2 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, 1 buah ruang perpustakaan dan arsip di (gedung lantai 1 bangunan baru), ruang kesekretariat FEDEP 1 buah, gudang dan tempat arsip 2 buah,



ruang tempat khusus merokok 1 buah serta 1 buah ruangan yang di pinjam Pemerintah Kota Magelang untuk dimanfaatkan sebagai ruang LPSE.

- b. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 27 unit
- c. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 5 unit
- d. Komputer PC 30 unit
- e. Printer 16 unit
- f. Notebook 10 unit
- g. Meja gambar hidrolis dan non hidrolis masing – masing 1 unit
- h. Scanner 1 buah
- i. Server Wewless 1 buah
- j. Mesin ketik 3 buah
- k. Software Fispra 1 unit
- l. Mesin Kompresor 1 unit
- m. Peralatan dan mesin bank data 1 unit
- n. LCD 5 unit
- o. Peralatan Jaringan Komputer 1 paket
- p. Meja ½ giro/ meja kerja 38 unit
- q. Meja rapat/meja panjang 13 unit
- r. Meja kursi tamu 12 unit
- s. Meja roda perpustakaan 4 unit
- t. Kursi lipat 220 unit
- u. Kursi kerja 35, Kursi Kabid 5 unit
- v. Almari 21 unit / Filing Kabinet 15 unit
- w. Rak buku 17 unit
- x. Brangkas 1 unit
- y. Mesin Absensi 1 unit
- z. Almari Perpustakaan 2 unit

Kondisi aset tersebut di atas tidak semuanya dalam kondisi baik, beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama aset–aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan administrasi penghapusan aset–aset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan. Selain itu juga terkait dengan biaya pemeliharaan yang akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi. Kendala untuk melakukan kegiatan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai atau sudah rusak berat terletak pada belum adanya Surat Edaran terbaru terkait dengan Penghapusan aset–aset daerah sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Selain masalah penghapusan aset, hal lain yang sangat diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan aset yang terkelola dengan baik, sehingga aset–aset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi aset. Pada tahun 2015 ini

Pemerintah Kota Magelang sudah banyak melakukan perbaikan terkait pengelolaan asset milik daerah, berkat kerjasama antara Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, DPPKD Kota Magelang beserta seluruh SKPD se-Kota Magelang maka sedikit demi sedikit pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengalami banyak kemajuan. Sensus barang yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan yang dilaksanakan langsung oleh pengurus barang masing-masing SKPD sangat membantu dalam penataan Asset yang selama ini masih belum sesuai antara catatan pada neraca dengan kondisi riil di lapangan. Pada Tahun 2015 ini juga telah diadakan rekonsiliasi asset dengan mencocokkan antara Asset yang dicatat dalam KIB oleh pengurus barang dengan Asset yang tercatat pada neraca, sehingga harus sesuai antara pencatatan nilai asset menurut pengurus barang dengan pencatatan nilai asset menurut pembuat neraca. Berita Acara Rekonsiliasi Asset harus ditandatangani oleh pengurus barang, pembuat neraca serta Pejabat Penatausahaan Keuangan dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi dari Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, Bagian Akuntansi DPPKD Kota Magelang dan tim dari Inspektorat Kota Magelang.

## ii. Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Magelang secara umum dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan kualitas, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan perencanaan daerah yaitu:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam negeri, sektor swasta, dan sebagainya;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan daerah bidang Per-ekonomian, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran ;
5. Meningkatnya implementasi dokumen perencanaan daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Musrenbang
7. Terpenuhinya kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR)
8. Meningkatnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah

9. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
10. Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan
11. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Pemanfaatan Teknologi Informasi pada era saat ini sangat menunjang kinerja pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan khususnya di Bappeda Kota Magelang sebagai SKPD yang mengampu Perencanaan Pembangunan di Kota Magelang. Koordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak terkait sangat dimudahkan dengan adanya fasilitas jaringan internet yang memadai. Dari sisi perencanaan dan penganggaran Sub Bag Program Bappeda Kota Magelang telah mengupayakan pembuatan Renja dan Renstra SKPD dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD) yang berbasis Web, sehingga SKPD dapat menginput data secara on-line dengan cepat dan mudah dimanapun mereka berada. Penggunaan sistem informasi ini diharapkan akan menghasilkan dokumen perencanaan yang handal, berkualitas dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi pelaporan Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini DPPKD sebagai SKPD pengampu bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa tengah telah menggunakan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi yang telah dibangun dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kota Magelang akan menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Accrual (Accrual Basis). Sedangkan untuk monitoring dan Evaluasi Bagian Pembangunan Setda Kota Magelang juga telah menggunakan E-Monev sebagai sistem informasinya.

### C. Isu Strategis Organisasi

Dalam menganalisis isu strategis Perencanaan Pembangunan, selain berdasarkan pada permasalahan atau isu-isu strategi yang ada ditingkat internal dan eksternal Bappeda Kota Magelang, juga memperhatikan permasalahan serta program prioritas kepala Daerah terpilih Tahun 2011-2015, hal lain yang penting perlu diperhatikan oleh Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi, sekurang-kurangnya sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat nasional dan Provinsi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, selain itu aspek Tata Ruang maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dalam maksud pelaksanaan penataan ruang.

Analisis isu strategis dikelompokkan ke dalam : a) analisis yang berkaitan dengan keadaan dan perbaikan keadaan kelompok sasaran/objek pelayanan yang dibutuhkan ke depan, sesuai amanat politis Kepala Daerah maupun arahan RPJMD yang mengindikasikan capaian kinerja SKPD yang diharapkan; b) analisis untuk peningkatan kapasitas SKPD, khususnya mengenai SDM dan kelembagaan secara

umum agar mampu merespons tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan; c) analisis merespons peluang-peluang maupun ancaman agar mampu menghadapi tantangan ke depan serta mencapai kinerja yang diharapkan. Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokkan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, Provinsi maupun kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, dengan tabel pembagian identifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.5 Identifikasi Isu - Isu Strategis yang Mempengaruhi Kinerja SKPD Perencanaan Pembangunan Daerah

	Tingkat Nasional		Tingkat Provinsi		Tingkat Kota
1.	Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan			1	Keterbatasan staf dengan latar belakang perencanaan pada Bappeda Kota Magelang
2	Perubahan lingkungan strategis	1	Perubahan peraturan per-undangan yang mengatur mekanisme perencanaan	2	Perubahan regulasi sebagai dasar/ acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
3	Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah	2	Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD	3	Belum mantapnya sistem perencanaan pembangunan daerah
4	Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur perencana			4	Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dalam penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
5	Meningkatnya konflik antar daerah dalam pengelolaan/ pemanfaatan sumberdaya alam				
6	Merenggangnya hubungan antar kelompok karena masalah geografis wilayah				
7	Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam			5	Belum optimalnya perencanaan pembangunan terkait dengan pendayagunaan kapasitas dan potensi kawasan, pola dan struktur ruang yang akan mendukung daya saing daerah Belum optimalnya perencana-

				6	<p>naan pembangunan terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sehingga daya dukung dan kelestarian lingkungan, fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menurun</p> <p>Belum terencananya pembangunan perumahan tidak layak huni dan lingkungan permukiman kumuh sehingga keberadaannya masih menyebar pada kawasan padat di Kota Magelang</p>
8	Kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai dengan harapan	3	Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD	7	Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD
9	Angka kemiskinan yang semakin besar			8	Belum optimalnya perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan hingga jumlah penduduk miskin di Kota Magelang masih cukup tinggi. Jumlah Penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 10.184 jiwa (7,78 %) atau sebesar 2.574 keluarga miskin (6,37 %) (Sumber : BPMPKB, 2014)
				9	Belum optimalnya perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan sehingga angka pengangguran terbuka masih tinggi, dengan kondisi ketenagakerjaan yang rendah pendidikannya, kualitas dan kompetensi tenaga kerja sangat kurang
10	Kemampuan persaingan yang lemah			10	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ekonomi di bidang investasi yang mampu memantapkan kondisi perekonomian daerah. Hal ini ditandai dengan masih belum kokohnya dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya realisasi investasi dan kemitraan antara pemerintah,

					swasta serta pelaku usaha
11	Kemampuan sumber daya yang masih terbatas			11	Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem, mekanisme dan arti penting perencanaan partisipatif Keterbatasan pengetahuan masyarakat & stakeholders terkait tentang tehnik, metode untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi skala prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan
12	Manajemen SDM yang belum mengarah ke peningkatan kinerja pegawai				
13	Belum adanya kebijakan nasional yang jelas mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja institusi			12	Belum adanya perencanaan mengenai reformasi birokrasi
14	Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kinerja lembaga / unit kerja			13	Kurangnya sinkronisasi antara perencanaan, pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pencapaian visi misi kepala daerah
15	Kualitas sarana dan prasarana dan prasarana belum tercukupi				
16	Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi	4 5	Menurunnya kepercayaan ter hadap jaminan kepastian akan direlaisasikannya rencana Kurang efektifnya proses perencanaan yang berakibat pada tumbuhnya perilaku "jalan pintas" (nerabas / short cutting)	14	Kondisi masyarakat yang makin kritis dalam mencermati pelaksanaan pembangunan menuntut adanya komitmen Pemda untuk memperbaiki mekanisme perencanaan sehingga dapat berjalan dengan baik & sesuai aspirasi masyarakat
17	Masih kurangnya ketatalaksanaan yg tersedia sesuai kebutuhan organisasi	6	Belum adanya NSPM Perencanaan	15	Belum adanya Standart Operating Procedure (SOP) Perencanaan
18	Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi untuk mendukung kinerja kementerian PPN/ Bappenas			16	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Badan Perencanaan

		7	Belum optimalnya pengelolaan data serta evaluasi pelaku rencana pembangunan	17	Belum optimalnya sistem pengelolaan database perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi serta lemahnya sistem data kearsipan
				18	Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan
		8	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	19	Belum optimalnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang berkeadilan terutama bagi penduduk miskin. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan
		9	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan, rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	20	Belum optimalnya perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang adil dan merata mengingat semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, sarana dan prasarana yang memadai, serta fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran yang mencukupi
				21	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berkeadilan terkait dengan pengarusutamaan gender

Mekanisme identifikasi isu-isu permasalahan pembangunan daerah tersebut dilakukan agar permasalahan paling prioritas atau isu strategis daerah, sudah mengakomodasi informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dinamika lingkungan eksternal dan isu-isu regional, nasional maupun global.

Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga tahun 2015 masih menyisakan permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi antara lain sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah:

- a. Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kota Magelang sebagai salah satu rencana rinci sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum. Proses menuju legalisasi raperda RDTR sangat panjang. Hal ini memberikan hambatan dalam aplikasi dan operasional rencana tata ruang, serta dalam memberikan pertimbangan perijinan yang tepat dan andal teknis.
- b. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum didukung oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Penataan ruang. Kesadaran masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (pemanfaatan dan pengendalian) serta pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan masih kurang.
- c. Tenaga, sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian perizinan kegiatan masih terbatas.
- d. Luasan RTH publik di Kota Magelang hingga saat ini belum memenuhi syarat minimal 20% sesuai yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Selama ini program kegiatan yang dilaksanakan cenderung pada peningkatan kualitas dan aspek visual dari RTH taman, tetapi belum fokus pada penambahan kuantitas RTH.
- e. Sistem informasi di bidang penataan ruang belum berjalan optimal karena peta-peta yang menjadi bahan informasi masih berupa peta RTRW dengan skala besar (1:25.000). Untuk peta-peta detail masih menunggu proses legalisasi RDTR.
- f. Belum finalnya keputusan penyelesaian batas wilayah, berdampak pada ketidakpastian tata ruang wilayah perbatasan.

## 2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD.
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
- c. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.



- d. Perlunya pemahaman yang sama di SKPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang inkremental.
- e. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- f. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
- g. Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implementasi E-Monev untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kota Magelang, maka perlu dirumuskan permasalahan paling prioritas yang sekaligus merupakan isu strategis daerah untuk mendapatkan solusi pada tahun 2016.

Isu Strategis yang menjadi prioritas program perencanaan pembangunan untuk ditangani di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan staf dengan latar belakang perencanaan pada Bappeda Kota Magelang
- b. Perubahan regulasi sebagai dasar/ acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
- c. Belum mantapnya sistem perencanaan pembangunan daerah
- d. Belum optimalnya kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dalam penyusunan dokumen – dokumen perencanaan
- e. Belum optimalnya perencanaan pembangunan terkait dengan pendayagunaan kapasitas dan potensi kawasan, pola dan struktur ruang yang akan mendukung daya saing daerah
- f. Belum optimalnya perencanaan pembangunan terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sehingga daya dukung dan kelestarian lingkungan, fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup menurun
- g. Belum terencananya pembangunan perumahan tidak layak huni dan lingkungan permukiman kumuh sehingga keberadaannya masih menyebar pada kawasan padat di Kota Magelang
- h. Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD
- i. Belum optimalnya perencanaan pembangunan penanggulangan kemiskin-

nan hingga jumlah penduduk miskin di Kota Magelang masih cukup tinggi.

- j. Belum optimalnya perencanaan pembangunan ekonomi di bidang investasi yang mampu memantapkan kondisi perekonomian daerah. Hal ini ditandai dengan masih belum kokohnya dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya realisasi investasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta serta pelaku usaha
- k. Kurangnya sinkronisasi antara perencanaan, pengelolaan kegiatan dan penganggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pencapaian visi misi kepala daerah
- l. Kondisi masyarakat yang makin kritis dalam mencermati pelaksanaan pembangunan menuntut adanya komitmen Pemda untuk memperbaiki mekanisme perencanaan sehingga dapat berjalan dengan baik & sesuai aspirasi masyarakat
- m. Belum adanya Standart Operating Procedure (SOP) Perencanaan
- n. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Badan Perencanaan
- o. Belum optimalnya sistem pengelolaan database perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi serta lemahnya sistem data kearsipan
- p. Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan
- q. Belum optimalnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang berkeadilan terutama bagi penduduk miskin. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan



## BAB. II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2011-2015

#### 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, serta dalam pencapaian target tahun 2011-2015, perlu adanya identifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, adalah sebagai berikut:

##### ■ Tantangan

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam negeri, sektor swasta, dan sebagainya;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran ;
5. Meningkatnya implementasi dokumen perencanaan daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang;
7. Terpenuhinya kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR)
8. Meningkatnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah
9. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
10. Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholders setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan
11. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan SKPD terkait;

▪ Peluang

1. Adanya aturan yang mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan - peraturan pendukungnya (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)
2. Adanya perubahan paradigma dari Top down planning menjadi Bottom up planning yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
3. Terbukanya peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, maupun seminar.

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang dalam Rangka Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJM Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015, Bappeda Kota Magelang bertanggungjawab melaksanakan semua Misi Kepala Daerah terpilih baik sebagai SKPD penanggung jawab maupun SKPD pendukung. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah perlu di kaji berbagai tantangan, kendala dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target 5 (lima) tahun kedepan, dalam dan kendala-kendala. Identifikasi Permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor- Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>MISI KE 1</b>				
1	Perencanaan Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan staf dengan latar belakang perencanaan pada Bappeda Kota Magelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan regulasi sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan kemampuan,</li> </ul>
2	Perencanaan Bidang Sosbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebaran SDM berlatar</li> </ul>		

Kode	Bidang urusan/ Pogram	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor- Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Perencanaan Tata Ruang	belakang perencana yang belum merata di tiap bidang		ketram-pilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop, dan seminar
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum tersedianya peraturan di daerah yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>▪ Keterbatasan staf dengan latar belakang perencanaan pada Bappeda Kota Magelang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Bappeda</li> <li>▪ Keterbatasan pemahaman masyarakat dan stakeholders tentang sistem, mekanisme dan arti penting perencanaan partisipatif dan juga tentang tehnik, metode mengidentifikasi permasalahan yang akan jadi skala prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan yang mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN beserta dengan peraturan - peraturan pendukungnya</li> </ul>
<b>MISI 4</b>				
1	Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan staf dengan latar belakang perencanaan pada Bappeda Kota Magelang</li> <li>▪ Kurangnya dukungan data dan informasi bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan regulasi sebagai dasar/acuan perencanaan menjadi kendala dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbukanya peluang dan kesempatan dari instansi Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, work-shop, maupun pelaksanaan seminar</li> </ul>

### 3. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Magelang Tahun 2011-2015 telah ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yaitu yaitu "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL". Adapun makna Visi tersebut adalah :

a. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

- b. Berkualitas artinya bahwa perencanaan harus mengedepankan kualitas baik proses perencanaan, produk perencanaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi.
- c. Partisipatif artinya bahwa dalam proses perencanaan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan aspirasi berupa kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan akan muncul rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun/ direncanakan.
- d. Berkeadilan artinya bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan memperhatikan program-program berkeadilan yang meliputi: (1) Pro Rakyat; (2) Keadilan untuk semua; dan (3) Pencapaian MDG's.
- e. Profesional artinya bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Good Governance.

#### 4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan visi misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang antara lain:

- a. Tujuan untuk mencapai misi pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur perencanaan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional adalah Mewujudkan aparatur perencanaan yang profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi;
- b. Tujuan untuk mencapai misi kedua, memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan adalah Mewujudkan sistem dan mekanisme perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan;
- c. Tujuan untuk mencapai misi ketiga, meningkatkan kualitas produk dan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang berkeadilan adalah (1) mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkeadilan baik perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dan (2) Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dan berkeadilan.
- d. Tujuan untuk mencapai misi keempat, meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah adalah (1) Meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah dan (2) Meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

## 5. Sasaran

Sasaran-sasaran guna mewujudkan tujuan BAPPEDA antara lain:

- a. Terdapat tiga sasaran untuk mewujudkan tujuan pertama, mewujudkan aparatur perencanaan yang profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi. Sasaran tersebut adalah:
  - Terwujudnya aparatur perencanaan yang professional.
  - Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Untuk mewujudkan tujuan kedua, memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan, terdapat dua sasaran yaitu:
  - Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas.
  - Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate.
- c. Untuk mewujudkan tujuan ketiga, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkeadilan baik perencanaan jangka pendek dan jangka menengah, terdapat satu sasaran yaitu:
  - Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan
- d. Untuk mewujudkan tujuan keempat, mewujudkan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dan berkeadilan, terdapat enam sasaran yaitu:
  - Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
  - Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi
  - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan
  - Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana
  - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan
  - Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.
- e. Untuk mewujudkan tujuan kelima, Meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, terdapat tiga sasaran yaitu:
  - Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi.
  - Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana.
  - Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya.
- f. Untuk mewujudkan tujuan keenam, meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, terdapat enam

sasaran yaitu:

- Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM;
- Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi;
- Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana;
- Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran, terdapat indikator sasaran dari setiap sasaran. Indikator sasaran tersebut yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja per Sasaran  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2011-2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1	Terwujudnya aparatur perencanaan yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, dan pendidikan formal terkait dengan perencanaan minimal 9 orang tiap tahunnya</li> <li>b. Terfasilitasinya aparatur perencanaan yang mengikuti Rakor dan Konsultasi terkait dengan perencanaan</li> <li>c. Jumlah seminar/ workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda</li> </ul>
2	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</li> <li>b. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</li> <li>c. Capaian kinerja pengelolaan keuangan</li> </ul>
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran/Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana</li> <li>b. Tingkat ketersediaan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</li> </ul>
4	Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (RPJMD dan RKPD)</li> <li>b. Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD</li> <li>c. Penyelenggaraan Musrenbang tahunan tepat waktu:</li> <li>d. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.</li> <li>e. Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Magelang perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang</li> <li>f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang, dilihat tingkat presensi/ kehadiran</li> <li>g. Forum SKPD ditiap SKPD dan Forum Gabungan SKPD di Tingkat Kota;</li> </ul>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis data program kegiatan Musrenbang Kelurahan;</li> <li>i. Jumlah Perencanaan yang melibatkan tenaga ahli/ professional</li> </ul>
5	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Profil Kota Magelang
6	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</li> <li>b. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</li> <li>c. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota</li> </ul>
7	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) /Jumlah produk perencanaan bidang ekonomi
8	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan</li> <li>b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan</li> </ul>
9	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang fisik prasarana</li> <li>b. Tersedianya 1 buah system dan dokumen database perumahan</li> </ul>
10	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan</li> <li>b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan</li> </ul>
11	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan	a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang sosial budaya
12	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan</li> <li>d. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan</li> </ul>
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi
14	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana
15	Meningkatnya koordinasi dan	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkroni-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
	sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	sasi perencanaan bidang Sosial Budaya b. Jumlah rakor dan Monev TKP
16	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPd dan RPJM	a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi b. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd
17	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd
18	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd
19	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd

## 6. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan SKPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil SKPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. SKPD selain bertanggungjawab dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, SKPD bertanggungjawab dalam mencapai sasaran -sasaran daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Kepala daerah.

Perumusan Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang sebelumnya, sedang alat yang dipergunakan untuk menyusun faktor – faktor strategis dari organisasi adalah Matrik SWOT. Teknik yang dipergunakan dalam matrik SWOT ini adalah dengan tehnik menginteraksikan faktor – faktor strategis agar terjadi suatu sinergi untuk mencapai tujuan. Adapun strategi yang dihasilkan setelah dilakukan analisis SWOT sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama, koordinasi antara Bappeda dengan SKPD - SKPD terkait, baik dalam skala kota, Provinsi maupun tingkat pusat dalam rangka untuk memperkuat peran dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta memperlancar pelaksanaan teknis pekerjaan;
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;

4. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan;
5. Meningkatkan secara bertahap ketatalaksanaan organisasi dengan tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) Perencanaan;
6. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;
7. Pengembangan lebih advanced data base perencanaan berbasis tehnologi informatika;
8. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
9. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan ;
10. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;
11. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan;
12. Peningkatan pemanfaatan tehnologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
13. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan ;
14. Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik Provinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
15. Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik Provinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
16. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehen sif dan terpadu;
17. Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD;
18. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.

## 7. Kebijakan

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu

dirumuskan kedalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan SKPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Tabel Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan aparatur perencana daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan aparatur perencanaan yang profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi	<p>1. Terwujudnya aparatur perencanaan yang profesional.</p> <p>2. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>1. Meningkatkan kerjasama, koordinasi antara Bappeda dengan SKPD - SKPD terkait, baik dalam skala kota, Provinsi maupun tingkat pusat dalam rangka untuk memperkuat peran dan kewenangan Badan Perencanaan serta memperlancar pelaksanaan teknis pekerjaan.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi</p> <p>1. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran</p> <p>2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan</p>	<p>1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan</p> <p>2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan</p> <p>1. Melaksanakan pengelolaan administrasi (perkantoran, keuangan, kepegawaian)</p> <p>2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset SKPD</p> <p>3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan keuangan SKPD secara tertib, lancar dan tepat waktu</p>

VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"

MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan aparatur perencana daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	<p>3. Meningkatkan ketatalaksanaan organisasi dengan tersedianya Standart Operating Procedure (SOP) Perencanaan</p> <p>1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan.</p> <p>2. Pengembangan data base perencanaan berbasis tehnologi informatika.</p>	1. Menyediakan sarana dan pra-sarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelak-sanaan tugas kantor

VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"

MISI 2 : Memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Mewujudkan sistem dan mekanisme perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan	<p>1. Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yg berkualitas.</p> <p>2. Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update.</p>	<p>1. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan</p> <p>3. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun</p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan</p> <p>2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas</p> <p>Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan</p>

VISI “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DI LAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL”

MISI 3 : Meningkatkan kualitas produk dan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkeadilan baik pe-rencanaan jangka pen-dek dan jangka menengah	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dan berkeadilan.	1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan 2. Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik Provinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	
	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan 2. Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fispra	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik Provinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	



VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DI LAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"

MISI 3 : Meningkatkan kualitas produk dan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan</li><li>2. Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya</li></ol>	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik Provinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	

VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
5. Meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib Pertanian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil, Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal
	2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Lingkungan Hidup
	3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kesehatan, Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan, Pemuda dan olah raga, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sosial

VISI "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESIONAL"

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6. Meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	2. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
	3. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana
	4. Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Tahun 2015 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2015 masih menggunakan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 yang telah disempurnakan dengan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dokumen Penetapan Kinerja ini masih dipergunakan dikarenakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan setelah Dokumen ini disusun.

Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Dokumen PK 2014 merupakan pembaharuan Dokumen RKT Tahun 2015 yang disempurnakan dalam Revisi PK tahun 2015 dengan beberapa perbaikan.

Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 yang merupakan program dan kegiatan utama berjumlah kegiatan yang terperinci dalam masing-masing Misi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Rencana Kinerja Tahunan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan aparatur perencana daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional			
1	Terwujudnya aparatur perencanaan yang professional	a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, dan pendidikan formal terkait dengan perencanaan minimal 9 orang tiap tahunnya b. Terasilitasinya aparatur perencanaan yang mengikuti Rakor dan Konsultasi terkait dengan perencanaan c. Jumlah seminar/ workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	101org  100%  5 kali
2	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai perturan yang berlaku	a. Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah c. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	90%  Sangat Baik  90%
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran/Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana  Tingkat ketersediaan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor)	90 %  100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>MI SI 2 : Memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan</b>			
4	Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas	a. Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (RPJMD dan RKPD) b. Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD c. Penyelenggaraan Musrenbang tahunan tepat waktu: d. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD. e. Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Magelang perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang perencanaan pembangunan daerah dengan dilihat tingkat presensi/ kehadiran g. Forum SKPD ditiap SKPD dan Forum Gabungan SKPD di Tingkat Kota; h. Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis data program kegiatan Musrenbang Kelurahan; i. Jumlah Perencanaan yang melibatkan tenaga ahli/ professional	Sesuai  100%  Tepat Waktu  85 %  Ada  90 %  Ada  Ada  15 dokumen
5	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Profil Kota Magelang	Ada
<b>MI SI 3 : Meningkatkan kualitas produk dan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
6	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	a. Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah b. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah c. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	-  -  Ada
7	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang ekonomi	4 dokumen
8	Tersosialisasikan produk perencanaan Bidang ekonomi	a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan  b. Jumlah produk perencanaan yang ter-implementasikan	4 dokumen  4 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
9	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan	a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang fisik prasarana b. Jumlah Produk Perencanaan	4 dokumen 4 dokumen
10	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana	a. Tersedianya produk perencanaan yang tersosialisasikan b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	4 dokumen 4 dokumen
11	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen
12	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.	a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	6 dokumen 6 dokumen
<b>MISI 4 : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah</b>			
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi	12 kali
14	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana b. Koordinasi Penataan Ruang Daerah	12 kali 12 kali pertemuan
15	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya b. Jumlah rakor dan Monev TKPK	12 kali 12 kali
16	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi b. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1 dokumen 90 %
17	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Pro-gram RPJMD ke dalam RKPD b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi	90 % 12 kali pelaksanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
18	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Pro-gram RPJMD ke dalam RKPD b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana	90 % 12 kali pelaksanaan
19	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Pro-gram RPJMD ke dalam RKPD b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang social budaya	90 % 12 kali pelaksanaan

Target Kinerja Tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat dalam Dokumen Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya aparatur perencanaan yang professional	<p>a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, dan pendidikan formal terkait dengan perencanaan minimal 9 orang tiap tahunnya</p> <p>b. Terfasilitasinya aparatur perencanaan yang mengikuti Rakor dan Konsultasi terkait dengan perencanaan</p> <p>c. Jumlah seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda</p>	<p>101 org</p> <p>100%</p> <p>5 kali</p>	<p><u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> </ul> <p><u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<p>200.000.000,00</p> <p>79.404.000,00</p> <p>33.860.000,00</p>
2	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	<p>d. Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>e. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>f. Capaian kinerja pengelolaan keuangan</p>	<p>90%</p> <p>Sangat Baik</p> <p>90 %</p>	<p><u>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>• Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran</li> <li>• Penyusunan Rencana Kerja SKPD</li> <li>• Penyusunan RKA SKPD</li> <li>• Penyusunan LKjIP SKPD</li> </ul>	<p>41.670.000, 00</p> <p>7.787.000, 00</p> <p>6.352.000, 00</p> <p>15.042.000, 00</p> <p>20.686.000, 00</p> <p>8.985.000, 00</p>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas	<p>j. Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan berlaku (RPJMD dan RKPd)</p> <p>k. Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPd</p> <p>l. Penyelenggaraan Musrenbang tahunan tepat waktu:</p> <p>m. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.</p> <p>n. Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Magelang perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang</p> <p>o. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dengan perencanaan pembangunan daerah dilihat dengan tingkat presensi/ kehadiran</p> <p>p. Forum SKPD ditiap SKPD dan Forum Gabungan SKPD di Tingkat Kota;</p> <p>q. Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis data program kegiatan Musrenbang Kelurahan;</p> <p>r. Jumlah Perencanaan yang melibatkan tenaga ahli/ professional</p>	<p>Sesuai</p> <p>100%</p> <p>Tepat Waktu</p> <p>85%</p> <p>Ada</p> <p>90%</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>15 dokumen</p>	<p><u>Program perencanaan pembangunan daerah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Musrenbang RKPd</li> <li>• Forum SKPD dan FGD</li> <li>• Publikasi Kegiatan Perencanaan pembangunan</li> <li>• Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD</li> <li>• Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD</li> </ul>	<p>109.120.000, 00</p> <p>105.878.000, 00</p> <p>43.620.000, 00</p> <p>71.384.000, 00</p> <p>70.829.000, 00</p>
4	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Profil Kota Magelang Tingkat ketersediaan	Ada	<p><u>Program Pengembangan data/informasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Profile Daerah</li> </ul>	121.506.000, 00
5	Tersedianya dokumen RKPd dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	d. Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		e. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah f. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	-  Ada	<u>Program perencanaan pembangunan daerah</u> • Penyusunan rancangan RKPD • Penetapan RKPD • Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD • Penetapan Perubahan RKPD	294.078.000, 00 34.855.000, 00 123.095.000, 00 29.305.000, 00
6	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang ber-kualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang ekonomi	4 dokumen perencanaan bidang ekonomi	<u>Program perencanaan pembangunan ekonomi</u> • Perencanaan Pengembangan Budidaya Jamur • Perencanaan Pengembangan Minawisata • Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Arah pengembangan CSR • Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu	120.258.000, 00 128.785.000, 00 80.000.000, 00 91.444.000, 00 142.345.000, 00
7	Tersosialisasikannya produk	c. Jumlah produk perencanaan yang	6 dokumen	<u>Program perencanaan pembangunan</u>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	perencanaan Bidang ekonomi	tersosialisasikan d. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	6 dokumen	<u>ekonomi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengembangan Budidaya Jamur 120.258.000, 00</li> <li>Perencanaan Pengembangan Minawisata 128.785.000, 00</li> <li>Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Arah pengembangan CSR 80.000.000, 00</li> <li>Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu 91.444.000, 00</li> <li>142.345.000, 00</li> </ul>	
8	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan	c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang fisik prasarana  d. Jumlah Produk Perencanaan	4 dokumen	<u>Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum 60.478.000, 00</li> </ul> <u>Program Perencanaan Tata Ruang</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL 319.661.000,00</li> <li>Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar 105.000.000, 00</li> <li>Masterplan Kawasan Soekarno Hatta 105.000.000, 00</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
9	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana	<p>a. Jumlah Produk Perencanaan yang tersosialisasikan</p> <p>b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan</p>	4 dokumen	<p><u>Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum</li> </ul> <p><u>Program Perencanaan Tata Ruang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL</li> <li>• Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar</li> <li>• Masterplan Kawasan Soekarno Hatta</li> </ul>	<p>60.478.000, 00</p> <p>319.661.000,00</p> <p>105.000.000, 00</p> <p>105.000.000, 00</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen perencanaan bidang Sosbud	<u>Program Perencanaan Sosial Budaya</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan TKPKD</li> <li>Perencanaan Pengembangan Pariwisata</li> <li>Perencanaan Pencegahan /Pengurangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> <li>Perencanaan Penganggaran Responsif Gender</li> <li>Kajian Analisis Gender</li> <li>Penyusunan Granddesign Kependudukan</li> </ul>	139.746.000,00 190.789.000, 00 121.848.000, 00 69.900.000, 00 98.292.000, 00 139.701.000, 00
11	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.	e. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan f. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	6 dokumen 6 dokumen	<u>Program Perencanaan Sosial Budaya</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>Perencanaan Pengembangan PAUD an anak berkebutuhan khusus.</li> <li>Penyusunan Masterplan Pember ayaan Kelembagaan Kemasya rakatan</li> </ul>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan</li> <li>• Kajian isu-isu strategis bidang sosial budaya</li> <li>• Masterplan kawasan budaya Mantyasih</li> </ul>	
12	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi	12 kali rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bid ekonomi (12 laporan hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi)	<u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u> A. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  <u>Program Kerjasama Pembangunan</u> B. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	18.722.000, 00  544.891.000, 00
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana	20 laporan	<u>Program perencanaan Bidang Fisik Prasarana</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana</li> </ul>	17.279.000, 00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		b. Koordinasi penataan ruang daerah	8 pertemuan	<p><u>Program Perencanaan tata Ruang</u> C. Koordinasi Penataan Ruang Daerah</p> <p><u>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</u> D. Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah</p>	<p>147.641.000, 00</p> <p>25.590.000, 00</p>
14	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	c. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	12 kali (12 laporan hasil koordinasi perencanaan bidang sosbud)	<u>Program perencanaan sosial budaya</u> E. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	20.000.000, 00
		d. Jumlah rakor dan Monev TKPK	12kali	F. Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	139.746.000, 00
15	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi	4 dokumen	<u>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</u>	16.515.000, 00
		d. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	G. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	90%  12 kali (12 laporan hasil monev perencanaan bidang ekonomi)	<u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u> H. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  <u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u> 1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	12.100.000, 00  106.429.000, 00
17	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fispra	90%  12 kali (12 laporan hasil monev perencanaan bidang fisik prasarana )	<u>Program perencanaan Bidang Fisik Prasarana</u> I. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  <u>Program Lingkungan Sehat Perumahan</u> 2. Monitoring dan Evaluasi strategi Sanitas Kota (SSK)	23.804.000, 00  22.419.000, 00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
18	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	<p>a. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD</p> <p>b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosbud</p> <p>c. Terselenggaranya Monitoring Pendidikan Semua Umur (PUS)</p>	<p>90%</p> <p>12 kali (12 laporan hasil monev perencanaan bidang sosial budaya )</p> <p>2 kali laporan</p>	<p><u>Program perencanaan sosial budaya</u> J. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p><u>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</u> K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>23.148.000, 00</p> <p>154.385.000, 00</p>

## BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

#### 1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja sebagai bagian dari langkah akuntabilitas kinerja, dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh SKPD. Agar pencapaian sasaran – sasaran tersebut dapat lebih terukur maka dituangkan ke dalam indikator – indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran – sasaran tersebut dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu: Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka gunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

- ❖ Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai >80 s/d 95 : baik
- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 mencapai 101,3% atau dalam kategori Sangat Baik sebagaimana uraian berikut ini:

MISI 1: Meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan aparatur perencana daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional

Dalam rangka melaksanakan misi pertama tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merumuskan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur ke dalam 8 indikator kinerja. Dalam rangka pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan. Berikut ini hasil evaluasi kinerja upaya melaksanakan misi pertama:

1. Sasaran Terwujudnya Aparatur Perencanaan yang Profesional

Bappeda Kota Magelang sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Magelang, harus mampu mengambil peran utama dalam menjawab tuntutan dan tantangan melalui peningkatan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk menjawab tuntutan dan tantangan ke depan serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka diperlukan aparatur yang profesional mengingat bahwa Keberhasilan suatu perencanaan tidak terlepas dari kualitas, profesionalisme dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perencana. Kemampuan dan keahlian aparatur perencana baik secara teknis maupun kemampuan lain yang mendukung penyusunan suatu perencanaan akan sangat berpengaruh pada kualitas perencanaan karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Peningkatan kualitas aparatur perencana termasuk di dalamnya peningkatan wawasan perencanaan aparatur perencana, penguasaan materi pekerjaan, meningkatkan kapasitas individu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peningkatan kinerja kreativitas dan profesionalisme aparatur perencana di Bappeda Kota Magelang.

Di bawah ini kami tampilkan keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Aparatur yang Profesional sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran Terwujudnya Aparatur yang Profesional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya aparatur perencanaan yang professional	a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, dan pendidikan formal terkait dengan perencanaan mini-mal 9 orang tiap tahun	101 org/keg	101org/keg	100%
		b. Terasilitasinya aparatur perencanaan yang mengikuti Rakor dan Konsultasi terkait perencanaan	100%	100%	100%
		c. Jumlah seminar/ workshop pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	5 kali	7 kali	140%
Pencapaian sasaran 1					113,33 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja dari sasaran di atas dimana capaian yang diperoleh sebesar 113,33 %, menunjukkan adanya keseriusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk terus berupaya kualitas, profesionalisme dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perencanaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah.

## 2. Sasaran Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku

Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good government) akan tercermin di dalam sistem akuntabilitas kinerja dari aparatur daerah dan instansi pemerintah. Akuntabilitas tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka untuk melaksanakan sasaran tersebut, Bappeda Kota Magelang pada tahun 2015 menetapkan dua program dan 18 kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut maka ditetapkan tiga indikator kinerja dengan target dan realisasi kinerja pada tahun 2015 sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2  
 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku	a. Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.	90%	90%	100 %
	b. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	c. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	90 %	84,95 %	94 %
Pencapaian sasaran 2				98,00 %

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya upaya yang mendukung untuk tertib Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 90%, Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sangat baik, atau kinerja 100 %. Sementara itu capaian kinerja pengelolaan keuangan baru mencapai angka 84,95 %. Rata rata capaian sasaran adalah 98 %

### 3. Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan Prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Aset, sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset, sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun asset yang tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap aset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan delapan kegiatan yaitu: kegiatan pembangunan gedung kantor; kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Tabel 3.3  
 Capaian Indikator Kinerja Misi 1 Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran / Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	95 %	95%	100%
	Tingkat ketersediaan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%
Pencapaian sasaran 3				100 %

Berdasarkan tabel di atas dari, kedua indikator kinerja yang merepresen tasikan sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran / Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dan indikator Tingkat ketersediaan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dimana keduanya menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja dari sasaran Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada tahun 2015 yaitu sebesar 100%

MISI 2 : Memantapkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berkeadilan

Dalam rangka melaksanakan misi kedua, dirumuskan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas dan Sasaran strategis. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran tersebut diukur ke dalam 10 indikator kinerja, yang akan dilaksanakan melalui 2 program dan 5 kegiatan. Berikut ini hasil evaluasi kinerja upaya melaksanakan misi kedua:

4. Sasaran Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Berkualitas

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini menuntut adanya peningkatan dan penyempurnaan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang selama ini diterapkan. Harapan terwujudnya suatu sistem

perencanaan yang mampu menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran yang jelas. Sistem perencanaan pembangunan tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik di pusat dan daerah. Dengan demikian terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi pencapaian sasaran program pembangunan serta pengembangan sharing pembiayaan untuk program-program pembangunan yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Magelang, harus mampu mengambil peran utama dalam menjawab tuntutan dan tantangan tersebut melalui peningkatan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk bisa menghasilkan suatu Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan pembangunan, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan harus diselenggarakan secara demokratis, dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi obyektif daerah. Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana dapat terselenggara secara berkelanjutan dan merupakan satu siklus perencanaan yang utuh.

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas	a. Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (RPJMD dan RKPD)	Sesuai	Sesuai	100%
	b. Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	100%	100%	100%
	c. Penyelenggaraan Musrenbang tahunan tepat waktu:	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	d. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD.	90%	90%	100%
	e. Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Magelang	Ada	Ada	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
	perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang	90 %	90%	100%
	f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang perencanaan pembangunan daerah dengan dilihat tingkat presensi/ kehadiran	Ada	Ada	100%
	g. Forum SKPD di tiap SKPD dan Forum Gabungan SKPD di Tingkat Kota;	Ada	Ada	100%
	h. Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis data program kegiatan Musrenbang Kelurahan;	15 dokumen	15 dokumen	100%
	i. Jumlah Perencanaan yang melibatkan tenaga ahli/ professional			
Pencapaian sasaran 4				100 %

Capaian sasaran terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas, pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tujuh indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian sebesar 100%. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah upaya untuk terus meningkatkan kualitas dari pelaksanaan Musrenbang, dimana Musrenbang merupakan suatu wadah partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan. Harapan ke depan hasil dari pelaksanaan Musrenbang akan benar – benar menghasilkan program dan kegiatan yang bermakna bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah dan tercermin ke dalam tiga kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Kegiatan Forum SKPD dan FGD, serta kegiatan Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan.

#### 5. Sasaran Terwujudnya Dukungan Data dan Informasi yang Terupdate

Peran data sangat besar dalam suatu perencanaan. Data sebagai sarana dalam pengambilan kebijakan. Kualitas dari suatu perencanaan tidak terlepas dari kualitas data yang ada, artinya data yang tersedia merupakan data yang update, valid dan reabilitas sesuai dengan kondisi yang ada sehingga keabsahan dari data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran adanya dukungan data dan informasi yang



terupdate maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Daerah dengan output kegiatan adalah tersusunnya buku Profile Daerah sebagai salah satu bentuk kegiatan yang Kegiatan merupakan kegiatan penyusunan buku profil daerah yang memuat delapan kelompok data potensi yang berisi gambaran dan penjelasan singkat secara kuantitatif maupun kualitatif disertai ulasan deskriptif serta grafik yang berisikan kelompok-kelompok data, antara lain : 1). data umum (kondisi geografis/pemerintahan); 2). sosial budaya; 3). sumber daya alam, 4). infrastruktur, 5). industri, perdagangan, pengembangan usaha nasional keuangan dan koperasi, 6). Ekonomi dan keuangan,7). Politik, Hukum dan keamanan, 8). data insidensial yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Misi 2 Sasaran Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Profil Kota Magelang	Ada	Ada	100%
Pencapaian sasaran 5				100 %

MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Produk dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan misi ketiga, dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis yang terepresentasi kedalam 13 (tigabelas) indikator kinerja. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran tersebut. Dalam rangka pencapaian misi ke tiga tersebut akan dilaksanakan melalui 5 program dan 11 kegiatan. Berikut ini hasil evaluasi kinerja upaya melaksanakan misi ketiga:

6. Sasaran Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan

Sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Maka untuk itu setiap daerah maka diharuskan membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang dengan rentang waktu selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang tertuang di dalam Dokumen Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen – dokumen perencanaan

tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan sehingga diharapkan akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran yang jelas. Dengan demikian terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi pencapaian sasaran program pembangunan serta pengembangan sharing pembiayaan untuk program-program pembangunan yang direncanakan. Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah tersebut dimaksudkan agar menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
1	2	3	4	5
Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	a. Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJPD Kota Magelang ditetapkan pada Bulan Pebruari Tahun 2009 )	Ada	Ada	100%
	b. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Ada	Ada	100%
	c. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	Ada	Ada	100%
Pencapaian sasaran 6				100 %

Pelaksanaan dari sasaran tersebut di atas telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan empat kegiatan yaitu Penetapan RPJMD, Kegiatan Penyelarasan rancangan Renstra SKPD , Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dan Kegiatan Penetapan RKPD. Dari capaian kinerja ketiga indikator sasaran dan capaian kinerja kegiatan menunjukkan ketercapaian kinerja sebesar 100%.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang sering disebut dengan RPJPD telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang melalui Perda tentang RPJPD Kota Magelang ditetapkan tanggal 23 Pebruari 2009 yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2009 ttg RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025. Sedangkan Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Perda tentang RPJMD Kota Magelang tanggal 28 Pebruari 2011 yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2011 ttg RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015. Dalam rangka penyelarasan RPJMD Kota Magelang dengan Renstra SKPD maka pada tahun 2011 Bappeda Kota Magelang melaksanakan Kegiatan Penyelarasan Rancangan Renstra SKPD. Kegiatan ini dimaksudkan agar terdapat sinergitas, keterkaitan dan kesinambungan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang terdapat di dalam

Perencanaan Jangka Menengah daerah dengan Perencanaan Jangka Menengah SKPD. Sementara untuk perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 ttg RKPD Kota Magelang Tahun 2016.

7. Sasaran Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

8. Tersosialisasikannya Program Perencanaan Bidang Ekonomi

Dokumen – dokumen perencanaan yang telah disusun tersebut merupakan wujud dari upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana. Untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsinya tersebut di bidang perencanaan maka kemampuan teknis dan profesionalisme perencana perlu di tingkatkan karena kualitas aparatur perencana akan sangat berpengaruh pada kualitas produk – produk perencanaan.

Perencanaan bidang ekonomi yang berhasil di selesaikan pada tahun 2015 adalah dokumen perencanaan Pengembangan Budidaya Jamur, Dokumen Perencanaan Pengembangan Mina wisata, Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan Corporate Social Responsibility, Dokumen Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dan Sasaran Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang ekonomi	4 dokumen	4 dokumen	100%
Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi	a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	4 dokumen	4 dokumen	100%
Pencapaian sasaran 7 dan sasaran 8				100 %

9. Sasaran Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana yang Berkualitas dan Berkeadilan

Produk Perencanaan di bidang Fisik Prasarana yang berupa dokumen Perencanaan bidang Fisik Prasarana yang dihasilkan pada tahun 2015 diantaranya dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Pemukiman Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Dokumen Kajian Isu-Isu Strategis bidang Fisik dan Prasarana, Dokumen penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL, Dokumen Masterplan Penataan RTNH di Plengkung dan Dokumen Masterplan Kawasan Rejomulyo Gunung Tidar.

Dibawah ini kami tampilkan tabel Capaian Sasaran Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana yang Berkualitas dan Berkeadilan dan sasaran Tersosialisasikannya Program Perencanaan Bidang Fisik Prasarana sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan	a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang fisik prasarana	4 dokumen	4 dokumen	100%
	b. Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010-2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010-2020, RTH dan RTBL Kawasan Lingkungan Strategis Lingkungan Hidup	1 dokumen RDTRK (BWK II, III dan V Kota Magelang)	1 dokumen RDTRK (BWK II, III dan V Kota Magelang)	100%
		1 dokumen penyusunan Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar	1 dokumen penyusunan Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar	100%
		1 dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Soekarno	1 dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Soekarno	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
		Hatta	Hatta	
		1 dokumen Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum	1 dokumen Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum	100%
Pencapaian sasaran 9				100 %

#### 10. Sasaran Tersosialisasikannya Program Perencanaan Bidang Fisik Prasarana

Dalam rangka pencapaian sasaran Tersosialisasikannya Program Perencanaan Bidang Fisik Prasarana pada tahun 2015 dilaksanakan melalui empat program yaitu Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1). Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah; 2). Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk 3). Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL; 4). Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 5) Penyusunan Masterplan Penataan RTNH di Plengkung Kalikota; 6). Penyusunan Masterplan Kawasan Rejomulyo Gunung Tidar; 7). Monitoring dan evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana	a. Tersedianya sarana informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada Masyarakat	Ada	Ada	100%
	b. Tersedianya informasi	5 kegiatan	5 kegiatan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
	mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			
Pencapaian sasaran 10				100 %

11. Sasaran Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas dan Berkeadilan

12. Tersosialisasikannya Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Pada Tahun 2014 produk perencanaan di bidang sosial budaya yang dihasilkan ada satu dokumen yang telah disusun dan yang sudah disosialisasikan adalah Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan. Dokumen Perencanaan Pengembangan PAUD dan Anak berkebutuhan khusus, Dokumen masterplan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan, Dokumen Masterplan kawasan Mastyasih.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Misi 3 Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan dan Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen	6 dokumen	100%
Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.	a. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan	6 dokumen	6 dokumen	100%
	b. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	6 dokumen	6 dokumen	100%
Pencapaian sasaran 11 dan sasaran 12				100 %

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan misi keempat ini, dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis yang terepresentasi kedalam 13 (tiga belas) indikator kinerja yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran tersebut. Dalam rangka pencapaian misi ke empat tersebut akan dilaksanakan melalui 5 program dan 5 kegiatan. Berikut ini hasil evaluasi kinerja upaya melaksanakan misi keempat :

13. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
14. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana
15. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Dalam rangka untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah maka salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu.

Kebijakan yang di laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan hasil pembangunan daerah di bidang ekonomi adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib Pertanian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil, Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal. Kebijakan ini dilakukan melalui Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatannya adalah Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatannya adalah Pengelolaan Website FEDEP.

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan UMKM di Kota Magelang dimana kegiatannya berupa fasilitasi berbagai kegiatan riil seperti pameran, promosi, forum rembug kluster dan lain-lain. Dari berbagai fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Magelang yang dalam hal ini UMKM - UMKM dan IKM yang berkembang di Kota Magelang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil.

Kebijakan di bidang Perencanaan Fisik Prasarana yang di laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan hasil pembangunan daerah di bidang Fisik Prasarana adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan kebijakan ini di jabarkan ke dalam Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh, sinergi dan terpadu di bidang Penataan Ruang yang dilakukan oleh instansi terkait yang tergabung dalam Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah di Kota Magelang. Adapun outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Kota Magelang.

Sementara kebijakan di bidang Perencanaan Sosial Budaya yang dilakukan untuk mendukung strategi meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu adalah dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang yang meliputi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kesehatan, Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan, Pemuda dan olah raga, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sosial. Adapun indikator kinerja sasaran ada dua yaitu Tersedianya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang sosial budaya dan Jumlah Rakor dan Monev TKPK. Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut maka dilaksanakan melalui Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatannya adalah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Kegiatan ini mencakup koordinasi dengan SKPD-SKPD yang mengampu urusan-urusan pemerintahan, kesehatan, kesos, kependudukan, pendidikan, pemuda, olah raga, budaya dan pariwisata dalam perencanaan untuk tahun 2015.

Selain koordinasi di dalam urusan - urusan tersebut, koordinasi ini juga intensif membahas masalah kemiskinan di Kota Magelang. Kemiskinan merupakan salah satu fokus utama dalam MDGs, sehingga merupakan kewajiban untuk semua negara agar lebih berkonsentrasi pada upaya - upaya penurunan kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Magelang didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh dan berpendidikan SD atau SMP, yang tidak mempunyai ketrampilan yang memadai, sehingga pendapatan yang mereka peroleh tidak mampu atau kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari

Angka kemiskinan di Kota Magelang yang relatif statis, menunjukkan bahwa program – program dan penanganan kemiskinan yang masih bersifat parsial sehingga hal ini menuntut adanya komitmen bersama antar semua SKPD untuk meningkatkan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Yang perlu



mendapat perhatian terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah peletakan kantong – kantong kemiskinan di Kota Magelang ada di mana dan apa saja yang dibutuhkan. Berangkat dari sini maka harus disatukan konsep kemiskinan sehingga menghasilkan sinergisitas program – program pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada identifikasi kantong – kantong kemiskinan yang ada sehingga akan bisa ditarik akar permasalahannya. Untuk bisa mengidentifikasi kantong kemiskinan dan mencari akar permasalahan dari kemiskinan yang terjadi di Kota Magelang maka bisa melakukan dialog publik selain itu perlu adanya perwujudan dari tata kelola yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dan bersama – sama menyelesaikan masalah bersama. Salah satu upaya Pemerintah untuk percepatan penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sehingga program – program penanggulangan Kemiskinan di Kota Magelang dapat berjalan secara terpadu, sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi.

Capaian indikator kinerja utama dari Sasaran meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis pada tahun 2015 dari 12 kali rakor dan monev yang ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2015, dapat terealisasi sebanyak 12 kali sehingga capaian kinerja dari sasaran tersebut sebesar 100%.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Misi 4 Sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana dan Sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi	12 kali	12 kali	100%
Pencapaian sasaran 13				100%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana	12 kali	12 kali	100%
Pencapaian sasaran 14				100%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Sosial Budaya	12 kali	12 kali	100%
	b. Jumlah rakor dan Monev TKPK	12 kali	12 kali	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Pencapaian sasaran 15				100 %

16. Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM
17. Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi
18. Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana
19. Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM maka strategi yang di terapkan adalah dengan Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan strategi tersebut adalah dengan Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kebijakan ini di jabarkan kedalam Program Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan amanah PP No 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi disebutkann bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten diwajibkan untuk melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKPD Kota Magelang yang dikoordinatori oleh Bappeda dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008.

Sementara untuk meningkatkan kualitas monitoring dan Evaluasi Perencanaan di Bidang Ekonomi, Fisik Prasarana dan Sosial Budaya maka strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana. Untuk Tahun 2015 Kebijakan ini masih dilaksanakan dalam satu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sementara untuk tahun 2016 agar pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dapat lebih maksimal seperti :

1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang Ekonomi yang akan melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKPD dan RPJMD Kota Magelang dalam urusan wajib Pertanian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil, Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal;
2. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang Fisik Prasarana yang akan melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKPD dan RPJMD Kota Magelang yang meliputi urusan wajib urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Lingkungan Hidup;
3. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang Sosial Budaya yang akan melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKPD dan RPJMD Kota Magelang yang meliputi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kesehatan, Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan, Pemuda dan olah raga, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sosial.

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Misi 4 Sasaran Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM, Sasaran Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Sasaran Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana dan Sasaran Meningkatnya Kualitas monitoring dan evaluasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1 dokumen 90 %	1 dokumen 100%	100% 111,11%
	b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang Ekonomi)	1 dokumen 90 %	1 dokumen 100%	100% 111,11%
Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang Fispra)	1 dokumen 90 %	1 dokumen 100%	100% 111,11%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Kinerja 2015
2	3	4	5	6
Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Bidang Sosbud)	90 %	100%	111,11%
Pencapaian sasaran 15				106 %

Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran – sasaran strategis sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Renstra Bappeda Kota Magelang tahun 2011-2015 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Untuk lebih jelasnya, keseluruhan Kinerja Sasaran dari masing-masing misi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Tabel Pengukuran Kinerja  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya aparatur perencanaan yang professional	<p>d. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, dan pendidikan formal terkait dengan perencanaan minimal 9 orang tiap tahunnya</p> <p>e. Terasiliasinya aparatur perencanaan yang mengikuti Rakor dan Konsultasi terkait dengan perencanaan</p> <p>f. Jumlah seminar/ workshop/ pelatihan yang diselenggarakan Bappeda</p>	<p>101 orang</p> <p>100%</p> <p>5 kali</p>	<p>101 orang</p> <p>100%</p> <p>7 kali</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>140%</p>	
2	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai perturan yang berlaku	<p>g. Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>h. Capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	<p>90%</p> <p>Sangat Baik</p>	<p>90%</p> <p>Sangat Baik</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p>	<p>Tingkat capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja dalam SAKIP. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi outcome dari setiap kegiatan yang dilakukan. Hasil Capaian kinerja Bappeda Kota Magelang tahun 2015 sebesar 87.14%</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		i. Capaian kinerja pengelolaan keuangan	90 %	84,45 %	97 %	Capaian kinerja pengelolaan keuangan didasarkan pada laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran / Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Tingkat ketersediaan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor)	90 % 100%	90% 100%	100% 100%	
4	Terwujudnya sistem perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang berkualitas	s. Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (RPJMD dan RKPD) t. Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD u. Penyelenggaraan Musrenbang tahunan tepat waktu: v. Prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja SKPD. w. Surat Edaran Kepala Bappeda Kota Magelang perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang x. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang perencanaan pembangu-	Sesuai 100% Tepat Waktu 90 % Ada 90 %	Sesuai 100% Tepat Waktu 85% Ada 90%	100% 100% 100% 94 % 100% 100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		<p>nan daerah dengan dilihat tingkat presensi/ kehadiran</p> <p>y. Forum SKPD ditiap SKPD dan Forum Gabungan SKPD di Tingkat Kota;</p> <p>z. Aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis data program kegiatan Musrenbang Kelurahan;</p> <p>aa. Jumlah Perencanaan yang melibatkan tenaga ahli/ professional</p>			100%	
			Ada	Ada	100%	
			Ada	Ada	100%	
			15 dokumen	15 dokumen		
5	Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	Profil Kota Magelang	Ada	Ada	100%	
6	Tersedianya dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan berkeadilan	<p>g. Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p> <p>h. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p> <p>i. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota</p>	-	-		Perda tentang RPJPD Kota Magelang ditetapkan tanggal 23 Pebruari 2009 yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2009 ttg RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025
			Ada	Ada	100%	Perda tentang RPJMD Kota Magelang ditetapkan tanggal 28 Pebruari 2011 yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2011 ttg RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015
			Ada	Ada	100%	RKPD Kota Magelang ditetapkan dengan Perwal No. 14 Tahun 2015 ttg RKPD Kota Magelang Tahun 2016 (ditetapkan tanggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						22 Mei 2015)
7	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang ekonomi	4 dokumen	4 dokumen	100%	
8	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang ekonomi	e. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan f. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	4 dokumen 4 dokumen	4 dokumen 4 dokumen	100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perencanaan Pengembangan Budidaya Jamur</li> <li>• Dokumen Perencanaan Pengembangan minawisata</li> <li>• Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan CSR</li> <li>• Dokumen Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu</li> </ul>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
9	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas dan berkeadilan	<p>e. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang fisik prasarana</p> <p>f. Jumlah Produk Perencanaan</p>	<p>4 dokumen</p> <p>4 dokumen</p>	<p>4 dokumen</p> <p>4 dokumen</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p><u>Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bidang Fisik Prasaran</li> </ul> <p><u>Program Perencanaan Tata Ruang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL</li> <li>Dokumen Masterplan Kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar</li> <li>Dokumen Masterplan Kawasan Soekarno Hatta</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
10	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Fisik Prasarana	<p>c. Tersedianya sarana informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada Masyarakat</p> <p>d. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital</p>	<p>Ada</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Ada</p> <p>1 dokumen</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Dokumen Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL</p>
11	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas dan berkeadilan	b. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Fisik Prasarana yang berkualitas (up-date dan Valid) / Jumlah produk perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen	6 dokumen	100%	<p><u>Program Perencanaan Sosial Budaya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Pengembangan Pariwisata</li> <li>• Perencanaan Pencegahan/Pengurangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</li> <li>• Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender</li> <li>• Kajian Analisis Gender</li> <li>• Penyusunan Grand Design Kependudukan</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
12	Tersosialisasikannya produk perencanaan Bidang Sosial Budaya.	g. Jumlah produk perencanaan yang tersosialisasikan  h. Jumlah produk perencanaan yang terimplementasikan	6 dokumen  6 dokumen	6 dokumen  6 dokumen	100%  100%	
13	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi	12 kali	12 kali	100%	<u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u>  • Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
14	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang fisik prasarana	12 kali	12 kali	100%	<u>Program perencanaan Bidang Fisik Prasarana</u>  • Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana
15	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya	e. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya  f. Jumlah rakor dan Monev TKPK	12 kali  12 kali	12 kali  12 kali	100%  100%	<u>Program perencanaan sosial budaya</u>  • Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya  • Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
16	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi  f. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1 dokumen  90 %	1 dokumen  90%	100%  100%	<u>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</u>  • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	100%	111,11%	<u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u>  • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  <u>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</u>  • Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Sejuta Bunga
18	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Fisik Prasarana	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	100%	111,11%	<u>Program perencanaan Bidang Fisik Prasarana</u>  • Monitoring, Evaluasi dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pelaporan</p> <p><u>Program Lingkungan Sehat Perumahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi strategi Sanitas Kota (SSK)</li> </ul>
19	Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	100%	111,11%	<p><u>Program perencanaan sosial budaya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul> <p><u>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ul>

## PENCAPAIAN KINERJA

Secara substantif Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam jangka menengah adalah tercapainya misi-misi jangka menengah sebagaimana yang telah dituangkan didalam Renstra Bappeda Kota Magelang, sedangkan dalam jangka pendek adalah tercapainya sasaran-sasaran jangka pendek sebagaimana tertuang dalam Renja SKPD Bappeda Kota Magelang Tahun 2015.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 yang terepresentasikan melalui capaian kinerja dari program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran – sasaran strategis, dapat di lihat pada table 3.14 di bawah ini

Tabel 3.14 Tabel Kinerja SKPD  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 1.04 . 1.06.01.01 . 15 1.04 . 1.06.01.01 . 15.08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Perumahan  Monitoring, evaluasi dan pelaporan  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya Program PLPBK <u>Hasil (Outcome) :</u> Terselenggaranya fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Program PLPBK di Kelurahan Tidar Selatan	35.629.000 35.629.000	32.479.000 32.479.000	1	1	Paket	1	1	Kelurahan	
1.04 . 1.06.01.01 . 16 1.04 . 1.06.01.01 . 16.13	Program Lingkungan Sehat Perumahan  Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK)  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya Dokumen Monev Program dan Kegiatan SSK <u>Hasil (Outcome) :</u> Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	22.419.000 22.419.000	20.991.000 20.991.000	4	4	laporan	4	4	Laporan	
1.05 . 1.06.01.01 . 15 1.05 . 1.06.01.01 . 15.18	Program Perencanaan Tata Ruang  Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya dokumen perda RDTRK BWK3 dan BWK 5	677.302.000 319.661.000	646.141.324 301.955.949	45	45	dok				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> - Dokumen Perda RDTRK BWK 3 dan BWK 5 dibahas di Pansus , - Dokumen Matriks BWK 4						45	45	Dokumen	
1.05 . 1.06.01.01 . 15.26	Koordinasi Penataan Ruang Daerah  <u>Keluaran (Output) :</u> Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah <u>Hasil (Outcome) :</u> Laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah	147.641.000	139.203.375	8	8	Keg	8	8	laporan	
1.05 . 1.06.01.01 . 15.40	Penyusunan Masterplan Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya dokumen masterplan kawasan sentra ekonomi lembah tidar <u>Hasil (Outcome) :</u> Rencana pengembangan kawasan sentra ekonomi lembah tidar	105.000.000	102.367.000	1	1	Paket	100	100	%	
1.05 . 1.06.01.01 . 15.41	Penyusunan Masterplan Kawasan Soekarno Hatta <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya dokumen masterplan kawasan soekarno hatta <u>Hasil (Outcome) :</u> Rencana pengembangan kawasan soekarno hatta	105.000.000	102.615.000	1	1	Paket	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01 1.06 . 1.06.01.01 . 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan jasa surat menyurat  <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah surat yang masuk dan keluar <u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat dan administrasi keuangan	576.888.000 3.430.000	514.953.140 3.321.160	2	2	item	100	100	%	



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 . 1.06.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <u>Keluaran (Output) :</u> - Layanan jasa komunikasi via telepon dan layanan listrik - Pesawat telepon - Rekening listrik - Layanan Internet <u>Hasil (Outcome) :</u> tersedianya jasa komunikasi, listrik , dan internet kantor	87.600.000	66.671.909							
				12	12	bln				
				2	2	Pesawat Telepon				
				1	1	rekening				
				1	1	g layanan				
							100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional 25 sepeda motor dan 5 unit mobil - Sepeda motor - Mobil <u>Hasil (Outcome) :</u> Adanya kendaraan yang ijinnya sudah dilaksanakan	7.710.000	5.134.825							
				22	22	unit				
				5	5	unit				
							100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan <u>Keluaran (Output) :</u> Honorarium pengelolaan keuangan daerah - Honorarium pengelolaan keuangan daerah - Laporan keuangan dan SPJ bulanan <u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda	113.248.000	109.959.200							
				11	11	orang				
				24	24	Bendel				
							100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 . 1.06.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor, dan jasa kebersihan dan perawatan taman Kantor - Tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor - Jasa kebersihan dan perawatan taman kantor  <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan sehat	19.176.000	17.656.500	32 3	32 3	item jns	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor  <u>Keluaran (Output) :</u> Alat tulis kantor yang tersedia  <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor	15.058.000	13.080.500	31	31	item	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  <u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya kegiatan cetak, fotocopy dan penjilidan  <u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya administrasi perkan-toran melalui kegiatan cetak, foto-copy dan penjilidan	34.844.000	33.804.575	3	3	item	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.620.000	4.447.500							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			16	16	Komponen	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan <u>Keluaran (Output) :</u> Jasa layanan surat kabar bulanan dan penyediaan buku peraturan perundang-undangan / buku referensi perencanaan <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara baik	3.960.000	3.960.000	4	4	jenis	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Penyediaan isi ulang tabung gas <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya kebutuhan gas	1.600.000	730.000	12	12	tbg	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman <u>Keluaran (Output) :</u> Jamuan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	33.411.000	29.322.900	12	12	bulan	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	175.633.071							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Perjalanan dinas luar daerah - Perjalanan dinas dalam daerah <u>Hasil (Outcome) :</u> Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran			34 120	34 120	kali kali	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap <u>Keluaran (Output) :</u> Belanja jasa tenaga kontrak/tenaga tidak tetap/penjaga malam dan operator telepon <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	51.231.000	51.231.000	1	1	Tahun	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02 1.06 . 1.06.01.01 . 02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Belanja modal pengadaan almari, filling kabinet, gordyn, wireless dan telepon <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	647.250.000 114.080.000	535.674.664 106.915.680	7	7	jenis	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya PC, Notebook, Printer, Monitor dan UPS <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya belanja peralatan Bappeda	176.952.000	165.072.300	7	7	jenis	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya meja tambahan untuk LCD	3.450.000	1.287.000	1	1	unit				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan rapat						100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor dan aula <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Bappeda	18.100.000	16.099.800	1,09	1,09	m2	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional <u>Keluaran (Output) :</u> Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda - Sepeda motor  - Mobil  <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpeliharnya secara rutin kendaraan dinas operasional Bappeda	229.677.000	160.973.084	22 5	22 5	unit unit	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Perlengkapan gedung kantor Bappeda yang terpelihara <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	9.476.000	9.101.800	11	11	item	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor <u>Keluaran (Output) :</u> Belanja jasa pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	66.015.000	48.645.000	14	14	item				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun						100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah mebeleur gedung kantor Bappeda <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpeliharanya mebeleur gedung kantor Bappeda	29.500.000	27.580.000	5	5	item	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 05 1.06 . 1.06.01.01 . 05.07	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD Workshop perencanaan pembangunan daerah <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah orang yang mengikuti workshop <u>Hasil (Outcome) :</u> Pemahaman dari aparatur mengenai sistem perencanaan daerah	113.264.000 79.404.000	86.794.600 57.631.700	101	101	orang	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 05.08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi <u>Hasil (Outcome) :</u> Pemahaman dari aparatur mengenai sistem perencanaan daerah	33.860.000	29.162.900	300	300	orang	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06 1.06 . 1.06.01.01 . 06.01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100.522.000 41.670.000	94.052.500 39.117.000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			12	12	Lap	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran <u>Keluaran (Output) :</u> Adanya laporan prognosis realisasi anggaran <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran	6.352.000	6.115.000	6	6	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun <u>Keluaran (Output) :</u> Laporan keuangan akhir tahun <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	7.787.000	7.744.600	5	5	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06.06	Penyusunan Rencana Kerja SKPD <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen renja dan renja perubahan Bappeda <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya dokumen renja bapeda yang berkualitas dan operasional	15.042.000	14.157.900	2	2	dok	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06.08	Penyusunan RKA-SKPD <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen RKA dan RKAP	20.686.000	17.933.000	2	2	dok				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya dokumen RKA dan RKAP bapeda yang berkualitas dan operasional						100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 06.09	Penyusunan LAKIP SKPD  <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen LAKIP Bappeda <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpenuhinya dokumen LAKIP bapeda yang berkualitas dan operasional	8.985.000	8.985.000	1	1	laporan	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 15 1.06 . 1.06.01.01 . 15.05	Program Pengembangan data/informasi Penyusunan Profile Daerah  <u>Keluaran (Output) :</u> Buku profil Kota Magelang Tahun 2015 dan profil per kecamatan tahun 2015 <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya data profil Kota Magelang Tahun 2015 dan profil per kecamatan tahun 2015	121.506.000 121.506.000	109.279.000 109.279.000	100	100	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 16 1.06 . 1.06.01.01 . 16.03	Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga  <u>Keluaran (Output) :</u> Terjalinnnya kerjasama yang sinergis antara instansi, lembaga dan dunia usaha dengan adanya Pameran Fedep Tk. Kota, Propinsi serta Koordinasi FEDEP - FRK - Pelatihan PEL - Pameran	544.891.000 544.891.000	502.455.750 502.455.750	1 1 6	1 1 6	FRK pelatih an Pamera n				



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya peningkatan potensi dan sumberdaya UMKM di Kota Magelang						100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.385.228.000	1.188.748.200							
1.06 . 1.06.01.01 . 21.38	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD <u>Keluaran (Output) :</u> Terverifikasinya dan tersahkannya Renja Perubahan SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Terencananya pembangunan di Kota Magelang yang sesuai dengan RKPd, RPJMD th 2011-2015 serta renstra SKPD	70.829.000	65.054.000	46	46	SKPD	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga <u>Keluaran (Output) :</u> laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan program sejuta bunga <u>Hasil (Outcome) :</u> Pembangunan magelang kota sejuta bunga dapat terlaksana sesuai dengan target indikator kinerja	106.429.000	83.410.200	50	50	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPd <u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya pengendalian dan evaluasi RKPd <u>Hasil (Outcome) :</u> terpenuhinya laporan pengendalian dan evaluasi RKPd	42.245.000	37.334.400	4	4	lap	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.48	Penetapan indikator kinerja RPJMD	169.010.000	160.186.250							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya buku indikator kinerja Kota Magelang <u>Hasil (Outcome) :</u> Terukurnya target kinerja			50	50	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.50	Penyusunan Rancangan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya dokumen rancangan pembangunan wilayah terpadu jangka menengah <u>Hasil (Outcome) :</u> Kebijakan rencana dan program dalam RDTRK sesuai dengan daya tampung dan daya dukung	102.400.000	50.982.000	75	75	buku	75	75	buku	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.58	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Branding Kota Magelang <u>Keluaran (Output) :</u> Draft Peraturan Walikota tentang Branding Kota Magelang <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 11 Tahun 2014 tentang Branding Kota magelang	66.465.000	29.549.000	2	2	Draf	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.08	Penyusunan rancangan RKPDP <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah buku rancangan RKPDP yang disusun <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya kegiatan penyusunan rancangan RKPDP dengan baik	294.078.000	272.650.000	300	300	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP <u>Keluaran (Output) :</u> Penyelenggaraan musrenbang RKPDP Kota Magelang Tahun 2015	109.120.000	100.973.800	2	2	Keg				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Berita Acara Musrenbang RKPD Kota Magelang						1	1	Dokumen	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.10	Penetapan RKPD <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah buku RKPD yang telah ditetapkan <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya kegiatan penetapan RKPD dengan baik	34.855.000	31.605.250	150	150	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Evaluasi RKPD Kota Magelang tahun 2015 <u>Hasil (Outcome) :</u> hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015	16.515.000	14.232.800	4	4	Laporan	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.14	Forum SKPD dan FGD <u>Keluaran (Output) :</u> Penyelenggaraan 1 kali Forum SKPD dan 5 kali FGD dengan tema yang berbeda <u>Hasil (Outcome) :</u> Berita acara hasil Forum SKPD dan FGD	105.878.000	100.501.500	200	200	Peserta	2	2	dok	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Keluaran (Output) :</u> Tertaksananya publikasi kegiatan perencanaan pembangunan di Bappeda Kota Magelang	43.620.000	39.868.500	20	20	poster				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya kegiatan publikasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan baik						1	1	tahun	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.32	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD  <u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya verifikasi Renja SKPD sehingga sesuai dengan RKPD, RPJMD tahun 2011-2015 serta Renstra SKPD <u>Hasil (Outcome) :</u> Terencananya pembangunan di Kota Magelang yang sesuai dengan RKPD, RPJMD th 2011-2015 serta renstra SKPD	71.384.000	66.134.000	46	46	SKPD	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.36	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya buku rancangan awal dan akhir perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2015 <u>Hasil (Outcome) :</u> Buku Rancangan awal dan akhir perubahan RKPD sebagai bahan penetapan RKPD perubahan tahun 2015	123.095.000	108.328.000	100	100	buku	100	100	buku	
1.06 . 1.06.01.01 . 21.37	Penetapan Perubahan RKPD  <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya buku penetapan perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2015 <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya kegiatan penetapan perubahan RKPD dengan baik	29.305.000	27.938.500	150	150	buku	150	150	buku	
1.06 . 1.06.01.01 . 22 1.06 . 1.06.01.01 . 22.04	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	513.714.000 18.772.000	412.496.092 5.976.000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi <u>Hasil (Outcome) :</u> Terkoordinasikannya dengan baik perencanaan pembangunan bidang ekonomi			12	12	keg	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya laporan hasil monev perencanaan pembangunan bidang ekonomi <u>Hasil (Outcome) :</u> Terakomodirnya perencanaan pembangunan ekonomi dengan baik	12.100.000	7.490.000	12	12	laporan	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 22.25	Perencanaan Pengembangan Budidaya Jamur <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah dokumen perencanaan pengembangan budidaya jamur <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya budidaya jamur beserta hasil olahannya di Kota Magelang	120.258.000	110.853.000	35	35	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 22.33	Perencanaan Pengembangan Mina Wisata <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen perencanaan pengembangan mina wisata <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya bahan pengambilan kebijakan dalam mengembangkan mina wisata di Kota Magelang	128.795.000	118.968.000	30	30	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 22.36	Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Magelang	91.444.000	77.432.592							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Tersusunnya Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan Corporate Sosial Responbility (CSR) Kota Magelang <u>Hasil (Outcome) :</u> Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kota Magelang			30	30	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 22.37	Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu <u>Keluaran (Output) :</u> Jumlah Dokumen perencanaan pelatihan kerja terpadu <u>Hasil (Outcome) :</u> Terwujudnya sinergitas pelaksanaan program pelatihan kerja antar SKPD Kota Magelang	142.345.000	91.776.500	30	30	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23 1.06 . 1.06.01.01 . 23.03	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya <u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya hasil perencanaan pembangunan bidang sosbud	957.809.000 20.000.000	697.904.100 15.283.000	12	12	keg	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan <u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil pemantauan pelaksanaan program perencanaan sosial budaya <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpantaunya pelaksanaan program sosial budaya	23.148.000	11.234.000	12	12	laporan	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 . 1.06.01.01 . 23.10	Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) <u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil koordinasi dari tim koordinasi penyusunan penanggu langan kemiskinan daerah (TKPKD) <u>Hasil (Outcome) :</u> Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan Kota Magelang oleh TKPK Kota Magelang	139.746.000	131.981.500	12	12	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.12	Perencanaan Pengembangan Pariwisata <u>Keluaran (Output) :</u> Terwujudnya Perencanaan Desa Wisata <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya acuan Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata	190.789.000	122.831.500	30	30	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PUS) <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya Buku Laporan Hasil Monev Pendidikan Untuk Semua (PUS)	154.385.000	127.923.700	50	50	buku	50	50	buku	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.23	Perencanaan Pencegahan/ Pengurangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak <u>Keluaran (Output) :</u> Tersedianya dokumen perencanaan pencegahan / pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak <u>Hasil (Outcome) :</u> Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	121.848.000	106.035.750	50	50	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.26	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	69.900.000	36.978.200							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen Panduan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Kota Magelang <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya Pedoman dan Standarisasi dalam Perencanaan Pembangunan Responsif Gender Kota Magelang			10	10	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.27	Kajian Analisis Gender <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen Kajian Analisis Gender <u>Hasil (Outcome) :</u> Teridentifikasinya Permasalahan Gender di Kota Magelang	98.292.000	72.958.000	10	10	buku	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 23.28	Penyusunan Grand Design Kependudukan <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Magelang Tahun 2016-2035 <u>Hasil (Outcome) :</u> Teridentifikasinya kondisi eksisting, proyeksi dan Rencana Pembangunan Kependudukan Kota Magelang Tahun 2016-2035.	139.701.000	72.678.450	10	10		100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 26 1.06 . 1.06.01.01 . 26.01	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana <u>Keluaran (Output) :</u> laporan hasil koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana <u>Hasil (Outcome) :</u> Terkoordinasinya dengan baik perencanaan bidang fisik dan prasarana	101.560.000 17.279.000	89.909.450 17.064.450	20	20	laporan	20	20	laporan	



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06 . 1.06.01.01 . 26.02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan <u>Keluaran (Output) :</u> Laporan hasil pemantauan pelaksanaan program perencanaan bidang fisik dan prasarana <u>Hasil (Outcome) :</u> Terpantaunya pelaksanaan program fisik dan prasarana	23.803.000	13.215.000	12	12	laporan	100	100	%	
1.06 . 1.06.01.01 . 26.09	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum <u>Keluaran (Output) :</u> Dokumen Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Kyai Mojo <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Kyai Mojo	60.478.000	59.630.000	1	1	paket	100	100	%	
1.08 . 1.06.01.01 . 15 1.08 . 1.06.01.01 . 15.09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah <u>Keluaran (Output) :</u> Terlaksananya koordinasi untuk kerjasama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Magelang <u>Hasil (Outcome) :</u> Tersedianya acuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pelaksanaan pembangunan TPA regional Kota Magelang	25.590.000 25.590.000	13.847.450 13.847.450	100	100	%	100	100	%	
1.08 . 1.06.01.01 . 24 1.08 . 1.06.01.01 . 24.06	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan RTH <u>Keluaran (Output) :</u> terwujudnya keindahan dan keasrian taman lingkungan kantor	10.320.000	10.113.000	1	1	Paket				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Hasil (Outcome) :</u> Terlaksananya kegiatan peningkatan keindahan dan keasrian taman lingkungan kantor						100	100	%	

## B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2015 merupakan tahun kesembilan penerapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 sebesar Rp. 8.094.749.000, 00 yang meliputi :

### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2015 yang berupa belanja pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 2.260.857.000,00 setelah perubahan tetap Rp. 2.260.857.000,00.

### 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2015 sebelum perubahan sebesar Rp. 5.166.431.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp. 5.833.892.000, 00.

Tabel 3.15 Belanja Daerah Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2015

Nama Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3
BELANJA DAERAH	7.427.288.000,00	8.094.749.000, 00
BELANJA TIDAK LANGUNG	2.260.857.000, 00	2.260.857.000, 00
Belanja Pegawai	2.260.857.000, 00	2.260.857.000, 00
BELANJA LANGUNG	5.166.431.000, 00	5.833.892.000, 00
Belanja Pegawai	1.732.378.000, 00	1.763.375.000, 00
Belanja Barang Jasa	3.289.996.000, 00	3.776.035.000, 00
Belanja Modal	149.057.000, 00	294.482.000,00

Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada tahun 2015 dapat di lihat pada table 3.16 di bawah ini :

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Daerah  
Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2015

Nama Belanja	Anggaran Perubahan 2015	Realisasi Anggaran 2015
BELANJA DAERAH	8.094.749.000, 00	7.250.708.410,00
BELANJA TIDAK LANGUNG	2.260.857.000, 00	2.055.729.301, 00
Belanja Pegawai	2.260.857.000, 00	2.055.729.301,00
BELANJA LANGUNG	5.833.892.000, 00	4.955.839.270,00
Belanja Pegawai	1.763.375.000, 00	1.511.150.000,00
Belanja Barang Jasa	3.776.035.000, 00	3.171.414.290
Belanja Modal	294.482.000,00	273.274.980

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2015 yang di uraian menurut Misi, Program, dan kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 3.17 Belanja Daerah Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2015

NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALI SASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
MISI 1 :				
Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Karyawan dan Aparatur Perencana Daerah dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional				
<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>				
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.430.000	3.321.000	96,83%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87.600.000	66.671.909	90,83%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.710.000	5.134.825	66,60%

NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	113.248.000	109.959.200	97,10%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.176.000	17.656.500	92,08%
	Penyediaan alat tulis kantor	15.058.000	13.080.500	86,87%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.844.000	33.804.575	97,02%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.620.000	4.447.500	79,14%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000	3.960.000	100,00%
	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000	730.000	45,63%
	Penyediaan makanan dan minuman	33.411.000	29.322.900	87,76%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	175.633.071	87,82%
	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honororer daerah/tidak tetap	51.231.000	51.231.000	100,00%
	<u>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	41.670.000	39.117.000	93,87%
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	6.352.000	6.115.000	96,27%
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.787.000	7.744.600	99,46%
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15.042.000	14.157.900	94,12%
	Penyusunan RKA SKPD	20.686.000	17.933.000	86,69%
	Penyusunan LAKIP SKPD	8.985.000	8.985.000	100,00%
	<u>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</u>			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	114.080.000	106.915.680	93,72%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	176.952.000	165.072.300	93,29%
	Pengadaan Mebeler	3.450.000	1.287.000	37,30%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.100.000	16.099.800	88,95%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	229.677.000	184.276.134	80,23%

NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.476.000	9.101.800	96,05%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	66.015.000	48.645.000	73,69%
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	29.500.000	27.580.000	93,49%
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>			
	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga	544.891.000	502.455.750	92,21%
	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			
	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	79.404.000	57.631.700	72,58%
	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33.860.000	29.162.900	86,13%
<b>MISI 2 :</b>				
Memantapkan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Mewujudkan Perencanaan yang Partisipatif dan Berkeadilan				
<u>Program perencanaan pembangunan daerah</u>				
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	109.120.000	100.973.800	92,53%
	Forum SKPD dan FGD	105.878.000	100.501.500	94,92%
	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	43.620.000	39.868.500	91,40%
<u>Program Pengembangan data/informasi</u>				
	Penyusunan Profile Daerah	121.506.000	109.279.000	89,94%
<b>MISI 3 :</b>				
Meningkatkan Kualitas Produk dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				
<u>Program perencanaan pembangunan daerah</u>				
	Penyusunan rancangan RKPD	294.078.000	272.650.000	92,71%
	Penetapan RKPD	34.855.000	31.605.250	90,68%
	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	71.384.000	66.134.000	92,65%
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	123.095.000	108.328.000	88,00%
	Penetapan Perubahan RKPD	29.305.000	27.938.500	95,34%

NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	70.829.000	65.054.000	91,85%
	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	42.245.000	37.334.400	88,38%
	Penetapan Indikator Kinerja RPJMD	169.010.000	160.186.250	94,78%
	Penyusunan Rancangan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah	102.400.000	50.982.000	49,79%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Branding Kota Magelang	66.465.000	29.549.000	44,46%
	<u>Program perencanaan pembangunan ekonomi</u>			
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	18.772.000	5.976.000	31,83%
	Perencanaan Pembangunan Budidaya Jamur	120.258.000	110.853.000	92,18%
	Perencanaan Pengembangan Minawisata	128.795.000	118.968.000	92,37%
	Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Arah Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Magelang	91.444.000	77.432.592	84,68%
	Pengembangan Pelatihan Kerja Terpadu	142.345.000	91.776.500	64,47%
	<u>Program perencanaan sosial budaya</u>			
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	20.000.000	15.283.000	76,42%
	Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	139.746.000	131.981.500	94,44%
	Perencanaan Pengembangan Pariwisata	190.789.000	122.831.500	64,38%
	Perencanaan Pencegahan/Pengurangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	121.848.000	106.035.750	87,02%
	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	69.900.000	36.978.200	52,90%
	Kajian Analisis Gender	98.292.000	72.958.000	74,23%
	Penyusunan Grand Design Kependudukan	139.701.000	72.678.450	52,02%
	<u>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</u>			
	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	25.590.000	13.847.450	54,11%
	<u>Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana</u>			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan	17.279.000	17.064.450	98,76%

NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Prasarana			
	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Fasilitas Umum	60.478.000	59.630.000	98,60%
	<u>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</u>			
	Penataan RTH	10.320.000	10.113.000	97,99%
	<u>Program Perencanaan Tata Ruang</u>			
	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	319.661.000	301.955.949	94,46%
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	147.641.000	139.203.375	94,29%
	Penyusunan Masterplan Kawasan Sentra Ekonomi Lembah Tidar	105.000.000	102.367.000	97,49%
	Penyusunan Masterplan Kawasan Soekarno Hatta	105.000.000	102.615.000	97,73%
MISI 4 :				
Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah				
	<u>Program perencanaan pembangunan daerah</u>			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	16.515.000	14.232.800	86,18%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	106.429.000	83.410.200	78,37%
	<u>Program perencanaan sosial budaya</u>			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.148.000	11.234.000	48,53%
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PUS)	154.385.000	127.923.700	82,86%
	<u>Program Lingkungan Sehat Perumahan</u>			
	Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota (SSK)	22.419.000	20.991.000	93,63%
	<u>Program Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana</u>			
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	23.803.000	13.215.000	55,52%
	<u>Program perencanaan pembangunan ekonomi</u>			



NO	MISI /PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		PENCAPAIAN TARGET %
		ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.100.000	7.490.000	61,90%
	<u>Program Pengembangan Perumahan</u>			
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	35.629.000	32.479.000	91,16%
	J U M L A H	5.833.892.000	4.955.839.270	84,95%



## BAB. IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

5. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2015 diukur berdasarkan atas hasil pengukuran atas sasaran - sasaran strategis sebagaimana yang terdapat di dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2011 – 2015, dimana pengukuran keberhasilan atau kegagalan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ini didasarkan pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dari evaluasi terhadap 15 sasaran strategis, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai capaian lebih dari 100%, 12 (dua belas) sasaran strategis dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%, dan 1 (satu) sasaran strategis dengan capaian di bawah 100% yaitu dengan capaian sebesar 98%. Adapun rata – rata capaian dari 19 sasaran strategi yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada tahun 2015 yaitu sebesar 101,3 %
6. Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan direpresentasikan melalui 6 (enam) urusan wajib, 15 (lima belas) program, dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan sehingga diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan mempercepat pencapaian sasaran – sasaran tersebut.
7. Dari evaluasi terhadap 72 (tujuh puluh dua) kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015, nilai capaian tertinggi dari pencapaian output kegiatan adalah 100.00% dan dicapai oleh 72 kegiatan. Adapun rata – rata capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 84.95%.
8. Secara keseluruhan Bappeda Kota Magelang pada Tahun 2015 telah menganggar-kan Total Belanja sebesar Rp.8.094.749.000,00. Total Anggaran pada Tahun 2015 tersebut terdiri dari Belanja Langsung yang dipergunakan untuk membiayai 72 (tujuh puluh dua) kegiatan belanja langsung sebesar Rp 5.833.892.000,00 dan Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.260.857.000,00. Realisasi Serapan anggaran pada tahun 2015 yaitu Rp. 7.011.568.571,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.955.839.270,00 dan realisasi Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 2.055.729.301,00. Rata-rata Realisasi Serapan Anggaran Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 sebesar 84,95 %

Secara keseluruhan Rata – rata nilai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2015 dapat dikategorikan berhasil dengan nilai sebesar 101,3%. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga beberapa kegiatan yang kinerjanya masih kurang terkait dengan kebijakan dan teknis pelaksanaan kegiatan, untuk itu perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun anggaran kedepan dapat terlaksana lebih baik.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang serta langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang par-tisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan;
- b. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (good governance), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
- c. Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan (sustainable) yang di dukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
- d. Membuat database dan sistem informasi pembangunan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.

- g. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;
- h. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;